

info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

INFO PASTI EDISI VIII - TAHUN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Pagelaran G20 merupakan salah satu perhelatan dunia terbesar bagi Indonesia di tahun 2022. Selain berskala internasional, Presidensi G20 Tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum ini dibentuk pada 1999. Pemerintah Indonesia benar-benar mempersiapkan pagelaran ini secara matang, diharapkan dapat memberikan dampak yang masif bagi tuan rumah maupun dunia.

Ilustrasi sampul oleh
Indyashadi Satya

DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan
Pengadaan, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Keuangan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen
Barang Milik Negara dan Pengadaan
Edy Gunawan

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Manajemen Teknis,
Data, dan Informasi
Saifurrahman

REDAKTUR PELAKSANA

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi
Yulia Candra Kusumarini

TIM REDAKSI

Ayu Damelia, Beby Vizca, Ibnu Sujono,
Indyashadi Satya, Irfan Murtadho

REDAKTUR FOTO

Irfan Murtadho, Indyashadi Satya

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Jeri Martin, Fuzy Wahyudi, Irfan Murtadho

ALAMAT REDAKSI

Gedung Djuanda 2 Lantai 16,
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

KONTAK

 [pastikanasetkita](#)  [info_pasti](#)

www.romadan.kemenkeu.go.id

call center: 143





Saifurrahman

Pemimpin Redaksi

Penyelenggaraan presidensi G20 pada tahun 2022 di Indonesia merupakan sebuah momentum untuk menunjukkan di mata dunia bahwa di masa kondisi pandemi COVID-19 yang berangsur mulai membaik ini, Indonesia mampu untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Sebagaimana slogan presidensi G20 Indonesia 2022 ini ialah *Recover Together, Recover Stronger*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia 2022 ini khususnya pada *Financial Track* yang mencakup pertemuan yang diadakan antara Menteri Keuangan dan Ekonomi, Gubernur Bank Sentral, Wakil Menteri dan Sherpa (perunding) yang ditunjuk oleh masing-masing kementerian ekonomi, terutama berfokus pada masalah ekonomi, keuangan, moneter dan perpajakan.

G20 merupakan sebuah *platform* multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Hal

ini dikarenakan secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80 persen perekonomian dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia, yang anggotanya terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, serta Spanyol yang diundang sebagai tamu tetap.

Saat ini, pandemi global telah mempengaruhi setiap aspek hidup masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perdagangan internasional. Pada saat yang sama, kesenjangan dalam kapasitas negara-negara untuk mengatasi krisis terus menghalangi dunia untuk sepenuhnya mengendalikan masalah dan krisis bersama yang kita hadapi saat ini.

Memahami tantangan dan perlunya upaya kolektif dalam mengatasi krisis, Indonesia akan fokus pada tiga pilar utama untuk Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu: Mempromosikan Produktivitas;

Meningkatkan Ketahanan, dan Stabilitas; dan Memastikan Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inklusif. Melalui pilar-pilar tersebut, Indonesia akan terus memimpin usaha di dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital. Sekaligus menjaga aspirasi untuk terus meningkatkan kapasitas kolektif kita dalam mengamankan kemakmuran bersama dunia, melalui berbagai upaya reformasi perpajakan global, kerjasama yang lebih kuat dalam memerangi korupsi, pendalaman pembiayaan infrastruktur, dan mendorong kerjasama internasional yang lebih demokratis dan representatif.

Akhir kata, semoga liputan dan tulisan dalam Info Pasti ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta inspirasi bagi para pembaca, dan semoga pandemi COVID-19 segera usai dan Indonesia dapat kembali pulih bersama dan lebih kuat.

Semoga bermanfaat.



#Pulih bersama



PULIH BERSAMA

Dalam keadaan perekonomian dunia yang masih dalam terdampak Covid-19, Indonesia ingin mengajak seluruh negara untuk bergerak bersama demi mencapai pemulihan dunia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

ISU PRIORITAS



**ARSITEKTUR
KESEHATAN GLOBAL**



**TRANSFORMASI
DIGITAL**



**TRANSISI ENERGI
BERKELANJUTAN**

All About G20 INDONESIA 2022

Group of Twenty (G20) merupakan institusi internasional yang beranggotakan 20 ekonomi terkuat dari berbagai kawasan di dunia.

Negara-negara yang tergabung dalam G20 mewakili :



Keanggotaan G20 terdiri atas dua kelompok :

1. Negara-negara G7 yang menguasai perekonomian dunia sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Kanada dan Jepang, serta Uni Eropa (EU)
2. Negara-negara berkembang dengan ekonomi yang tumbuh pesat yaitu Cina, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, Brazil, Argentina, Mexico, Rusia, Turki, Arab Saudi, dan Afrika Selatan



Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 dari Asia Tenggara dan telah aktif mengikuti berbagai negosiasi atau memimpin inisiatif dalam G20 sejak berdirinya institusi ini. Keikutsertaan Indonesia dalam G20 memperlihatkan pengakuan negara-negara besar dunia terhadap kekuatan dan pengaruh Indonesia. Keanggotaan dalam G20 berarti juga keterlibatan dalam *global governance* dan mempengaruhi tata dunia yang membuka peluang lebih besar bagi perjuangan kepentingan nasional Indonesia.





G20 menjadi institusi tingkat kepala negara sejak tahun 2008 dalam rangka mencari solusi terhadap krisis keuangan di Eropa dan Amerika Serikat saat itu yang mengakibatkan ketidakstabilan sistem keuangan dan ekonomi dunia. G20 tidak memiliki pemimpin atau ketua tetap. Fungsi presidensi dipegang salah satu anggota selama satu tahun. G20 tidak memiliki sekretariat tetap, karena itu koordinasi untuk menjaga kesinambungan dipegang oleh Troika yang terdiri dari negara presidensi berjalan, negara presidensi sebelumnya, dan negara presidensi berikutnya. Kata troika berasal dari bahasa Rusia yang artinya tiga serangkai. Anggota Troika G20 saat ini terdiri dari Indonesia, Italia (presidensi sebelumnya), dan India (kandidat presidensi berikutnya).

Forum G20 membahas dua arus isu yakni *Finance Track* dan *Sherpa Track*. Selama 12 tahun G20 berevolusi sebagai forum negosiasi dan kerja sama antar negara-negara ekonomi terkuat di dunia tidak hanya untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi dan keuangan dunia dalam *Finance Track*, tapi juga isu-isu yang mempengaruhi pembangunan yaitu perubahan iklim, pendidikan, tenaga kerja, energi, dan gender dalam *Sherpa Track*. Walaupun tidak pernah secara resmi mendapat otorisasi dari masyarakat internasional, G20 secara *de facto* menjalankan "*global governance*" tata ekonomi dan non-ekonomi dunia mengingat kesepakatan dan kerjasama yang dihasilkan G20 menjadi acuan negara-negara anggotanya dan berbagai institusi keuangan internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *Organisation for Economic Co-operation and Development*.

Presidensi G20 memegang peran besar dalam proses penentuan agenda G20 selama satu tahun masa kepemimpinannya. Mekanisme kerja dalam penetapan arah dan prioritas G20 selama ini bersifat informal, fleksibel dan tergantung pada negara yang menjadi Presiden

G20. Presidensi G20 berhak menetapkan dan mengumumkan sejumlah isu prioritas yang sesuai dengan mandat dan tujuan G20 serta urgensi yang mendesak di masa kepemimpinannya. Presidensi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian negosiasi dan pertemuan persiapan menuju KTT tersebut. Untuk itu, Presidensi G20 menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tematik, khususnya di tingkat menteri yang diharapkan dapat menghasilkan komunikasi sesuai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan presidensi. Dalam KTT G20, para kepala negara dan pemerintahan anggota G20 mendiskusikan laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berisi rekomendasi dari berbagai *working group* yang berada di bawah naungan *Finance Track* dan *Sherpa Track*, serta hasil dari pertemuan-pertemuan G20 tingkat menteri. KTT ini kemudian akan menghasilkan sebuah deklarasi atau komunikasi anggota G20. Untuk memastikan kontinuitas dari KTT satu ke KTT berikutnya, G20 mengadopsi sistem Troika ("*revolving three-member management*"). Dengan demikian tahun 2021 Indonesia menjadi anggota Troika bersama Itali (Presiden tahun 2021) dan Arab Saudi (Presiden tahun 2019). Tahun 2022, sebagai Presiden G20, Indonesia akan didampingi Itali dan India (Presiden G20 tahun 2023). Sebagai Presiden G20, Indonesia akan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan agenda prioritas G20 dalam periode selama menjabat sebagai ketua di tahun 2022. Indonesia dapat merumuskan isu-isu spesifik yang akan dibahas secara khusus dalam G20 Workstream (Task Force, Working Group, Pertemuan Deputi Menteri, Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Sherpa dan Konferensi Tingkat Tinggi). Hasil pembahasan di berbagai tingkat pertemuan G20 tersebut dituangkan dalam *outcome document* yang nantinya akan disepakati dan diluncurkan dalam pertemuan tingkat menteri dan KTT.

Indonesia ditetapkan pada *Riyadh Summit* 2020, dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 di kota Roma, Italia. Secara resmi Presidensi G20 Indonesia dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada akhir tahun 2022. Puncak KTT G20 akan dilaksanakan di Bali, namun G20 Indonesia terdiri dari beragam pertemuan (sekitar 157 pertemuan) yang akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Sekitar 19 kota selain Bali akan dilibatkan, seperti Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Batam - Bintan, Belitung, Medan, Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, dan lainnya. KTT G20 atau *G20 Leaders' Summit* akan dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara anggota dan negara undangan.

Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999. Saat itu, Indonesia ada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997-1998 dan dinilai sebagai *emerging economy* yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia. Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) di antara anggota G20. Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru (*New Established Emerging Market*) dengan PDB di atas US\$ 1 Triliun.

Pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 pada tahun 2022 memiliki potensi besar terhadap peningkatan perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam jangka pendek, kegiatan utama Presidensi G20, yaitu *conference summit*,

diperkirakan memiliki kontribusi signifikan terhadap sektor-sektor yang berhubungan langsung terhadap penyediaan fasilitas kegiatan seperti sektor akomodasi dan makan minum, serta sektor transportasi. Kegiatan perekonomian masyarakat lokal, seperti UMKM, turut terpromosikan sebagai manfaat dari masifnya kegiatan pendamping Presidensi G20 (*side events*). Dalam jangka menengah, peningkatan aktivitas perekonomian tersebut diproyeksikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 33.000 tenaga kerja. Manfaat ekonomi tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan konsumsinya, khususnya pada sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, konsumsi domestik diestimasikan meningkat sebesar Rp 1,7 triliun. Selanjutnya, kegiatan Presidensi G20 diestimasikan mampu mengurangi kesenjangan sosial sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan domestik, baik secara regional maupun nasional. Dampak Jangka Panjang Negara-negara anggota G20 menguasai 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan dunia dan mewakili 60% penduduk dunia, sehingga forum ini dipandang signifikan dan sistemik. Keberhasilan forum ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi negara dan entitas di luar anggotanya. Pembentukan G20 pada awalnya fokus pada upaya reformasi sistem keuangan global untuk menjawab krisis keuangan. Seiring perkembangannya, G20 kini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang.

Teks: Gayuh Ardhi, Beby Vizca

Foto: g20.org



Presidensi G20 Indonesia 2022: Proyek Membumikan Langit



Group of Twenty (G20) diinisiasi pada tahun 1999 oleh anggota G7 yang merupakan organisasi negara maju. G20 merupakan perkumpulan dari 20 negara maju dan berkembang (*emerging economies*) dari seluruh dunia. Negara anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Negara anggota G20 menyumbang lebih dari 80% GDP global, 75% perdagangan global, dan berpenduduk sekitar 60% penduduk dunia.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, secara resmi Indonesia melanjutkan Presidensi G20 yang pada tahun 2021 dipegang oleh Italia. Penyerahan dilakukan pada penutupan KTT G20 Roma yang secara simbolik dilakukan dengan penyerahan palu kepada Presiden Joko Widodo dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Dalam momen tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa komitmen utama Presidensi G20 Indonesia adalah mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar "*Recover Together, Recover Stronger*". Pertumbuhan yang inklusif, *people-centered*, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, selain mengundang anggota G20, juga turut mengundang Spanyol, Ghana, Kenya, Swiss, Belanda, Singapura, *Pacific Island Forum*, dan *Caribbean Community*. Selain itu, mengundang juga berbagai organisasi internasional seperti *World Bank*, *United Nation*, *Organisation for Economic Co-operation and Development*, *International Monetary Fund*, *Asian Infrastructure Investment Bank*, *Bank for International Settlement*, *European Bank for Reconstruction and Development*, *Financial Action Task Force on Money Laundering*, *Financial Stability Board*, dan *Global Infrastructure Hub*.



Manfaat sebagai Presidensi G20

Sebagai Presidensi G20, Indonesia memperoleh manfaat antara lain:

- Sebagai pembuktian bahwa Dunia memiliki persepsi yang baik atas ketahanan ekonomi Indonesia terhadap krisis yang terjadi karena pandemi;
- Sebagai bentuk pengakuan dunia atas status Indonesia yang merepresentasikan negara berkembang lainnya;
- Dapat dijadikan sebagai momentum dalam memberikan nilai tambah dalam pemulihan ekonomi Indonesia terlebih Presidensi ini hanya terjadi satu kali dalam tiap generasi (20 tahun sekali);
- Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar dapat mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan ekonomi Indonesia;
- Kesempatan bagi Indonesia membuktikan di level internasional khususnya dalam pemulihan ekonomi global;
- Menjadikan Indonesia menjadi perhatian dunia, khususnya bagi pelaku ekonomi dan keuangan;
- Sarana memperkenalkan pariwisata, budaya, dan produk unggulan Indonesia kepada dunia dengan harapan dapat menarik wisatawan dan investasi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.

Dampak Presidensi G20 Indonesia dalam Perekonomian

Menurut Menteri Keuangan, Presidensi G20 Indonesia akan berkontribusi sekitar Rp7,4 T pada PDB Indonesia dan akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 T. Lalu dari aspek pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan kegiatan ini akan mendorong peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8-3,6 juta dan 600-700 ribu lapangan kerja baru pada sektor kuliner, fesyen, dan kriya. Sedangkan dari aspek investasi, Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan gelaran ini akan mendorong investasi UMKM dalam negeri, mengingat 80% investor global berasal dari anggota G20.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Tim Kerja G20 Universitas Indonesia tentang manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia yang dirilis pada bulan Juni tahun 2021, diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan dalam perputaran ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor yang berhubungan dengan penyediaan makanan dan minuman, akomodasi (penginapan), transportasi, serta sektor pariwisata. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka Presidensi G20 ini akan mendorong perekonomian lokal baik bagi pengusaha kecil maupun menengah, dimana rangkaian kegiatan Presidensi G20 ini akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang.

Hal ini sangat penting bagi Indonesia, khususnya pasca pandemi karena sektor perekonomian sempat terhambat karena kebijakan pembatasan wisatawan, penerbangan, serta kegiatan lainnya. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi pengusaha di bidang tersebut dan sebagai *multiplier effect* atas Bergeraknya sektor tersebut yang diharapkan akan mendorong sektor lain sehingga dapat memutar roda ekonomi lebih cepat dan mendorong pemulihan ekonomi negara lebih cepat.

Presidensi G20 Indonesia yang Membumi

Jika menilik dari latar belakang berdirinya G20, tak heran jika banyak masyarakat berasumsi bahwa Presidensi G20 Indonesia ini hanya merupakan gelaran para elitis, yang mana tidak berdampak signifikan bagi masyarakat kecil dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui informasi terkait pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah melakukan strategi komunikasi yang lebih masif yang sasarannya tidak hanya masyarakat internasional tapi juga seluruh kalangan masyarakat dalam negeri. Strategi komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap gelaran Presidensi G20 Indonesia serta menunjukkan bahwa gelaran ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang besar bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Keberhasilan dari gelaran ini akan berdampak positif bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia tak terkecuali. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat turut mendukung dan berbangga terhadap kesempatan yang diperoleh Indonesia untuk mengetuai Presidensi G20 Tahun 2022, dimana keberhasilan dan kesempatan yang diraih oleh Indonesia pada Presidensi G20 ini tidak lepas dari peran serta seluruh komponen masyarakat.



Presiden menyampaikan pesan bahwa komunikasi publik dalam pertemuan G20 harus bersifat masif, dan menjadikan keberhasilan pengelolaan komunikasi publik dalam gelaran Asian Games 2018 dapat menjadi *benchmark* dan perlu di-*upgrade* menjadi lebih besar lagi.

Peran Kementerian Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 2021, Menteri Keuangan diamanatkan untuk memimpin *Finance Track* (Jalur Keuangan) sebagai Ketua I bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai Ketua II.

Sampai dengan artikel ini ditulis, Kementerian Keuangan bersama dengan BI telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain pada bulan Desember, yaitu 1st *Finance and Central Bank Deputies* (FCBD) *Meeting* yang dilakukan secara *hybrid* di Bali, serta 1st *International Financial Architecture Working Group* (IFAWG) dan 1st *Joint Finance and Health Task Force* (JFHTF) yang dilakukan secara virtual, 5 kegiatan yang dilakukan secara

virtual di bulan Januari (1st *Framework Working Group* (FWG), 1st *Infrastructure Working Group* (IWG), 1st *Sustainable Finance Working Group* (SFWG), 2nd JFHTF, dan 2nd IFAWG) dan di bulan Februari adalah 1st *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPII) yang dilakukan secara virtual, serta gelaran terakhir adalah 2nd FCBD *Meeting* dan 1st *Finance Ministers and Central Bank Governors* (FMCBG) *Meeting* yang diselenggarakan secara *hybrid* di Jakarta. Arahan Presiden agar Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Presidensi G20 *Finance Track* dalam berbagai aspek, seperti keterlibatan Pengusaha Kecil/Mikro, pengenalan budaya Indonesia, konsep acara yang sederhana namun elegan serta strategi komunikasi yang lebih ringan dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

2nd FCBD Meeting dan 1st FMCBG Meeting Finance Track

Salah satu rangkaian pertemuan Presidensi G20, 2nd FCBD *Meeting* dan 1st FMCBG *Meeting Finance Track* yang di-*lead* oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Februari 2022 di area Gelora Bung Karno (GBK) DKI Jakarta. FCBD *Meeting* merupakan agenda pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari

negara dan organisasi internasional setingkat *deputies*, sedangkan FMCBG *Meeting* untuk setingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral. FCBD/FMCBG *Meeting* merupakan salah satu rangkaian kegiatan Presidensi G20 menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/*Summit* yang merupakan rapat tingkat Kepala Negara/Pemerintahan yang rencananya akan digelar pada bulan November 2022.

2nd FCBD *Meeting* dilaksanakan secara *hybrid* dengan 50 delegasi hadir secara fisik dan sebanyak 77-152 delegasi per hari hadir secara virtual. Sedangkan 1st FMCBG *Meeting* dilaksanakan pada tanggal 17-18 Februari 2022 *back-to-back* dengan 2nd FCBD *Meeting*, dilaksanakan secara *hybrid* dengan 54 delegasi hadir secara fisik dan sebanyak 181-183 per hari hadir secara virtual. 1st FMCBG *Meeting* dibuka Menteri Keuangan dan *Keynote Speech* oleh Presiden Joko Widodo secara Virtual. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pidato Presiden antara lain:

1. Pandemi COVID-19 belum berakhir.
2. Ekonomi dunia masih berguncang.
3. Tidak ada satu negara yang bisa bangkit sendiri. Semua negara harus saling bekerja sama, saling terkoneksi, dan tidak ada yang terisolasi.
4. Kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya.
5. Tidak boleh terjadi pertikaian dan membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Terutama bila membahayakan keselamatan dunia.

Dari sudut pandang rangkaian acara, penyelenggaraan rangkaian agenda FCBD/FMCBG *Meeting* berupaya menyeimbangkan antara kesan formal dan informal, dimana terdapat sesi *meeting* formal dan *social program* yang dilakukan disela-sela sesi *meeting*, selain itu saat sesi *break* para delegasi disugahi oleh kopi asli Indonesia dan terdapat pameran produk unggulan UMKM serta *showcasing* penun dan penganyam dari daerah Jawa dan Bali.



Pendekatan Informal melalui Social Program

Di sela-sela rangkaian padat dan melelahkan dalam pertemuan FCBD/FMCBG Meeting yang merumuskan berbagai kebijakan di sektor keuangan, dilaksanakan pula kegiatan *social program*, diantaranya *hospitality dinner*, olah raga pagi serta pelepasliaran burung di area hutan Kota GBK. Saat pelaksanaan *hospitality dinner* delegasi diajak menyantap hidangan Indonesia serta disuguhi dengan *live music* serta pertunjukan seni yang bertema *Tale of Blencong*. Dalam kesempatan itu turut dihadiri juga oleh Ketua BPK, Ketua Banggar, Ketua Komisi XI, Menko Marves, Wakil Menteri Luar Negeri, Menkominfo, Menkes, Kepala BNPB, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur Bali, dan Anggota Komisioner LPS. Kehadiran dari undangan tersebut juga merupakan simbol dukungan seluruh elemen negara dalam pelaksanaan Presidensi G20, khususnya *Finance Track*.

Kegiatan *social program* berikutnya adalah olah raga pagi yang dilakukan di sekitar Stadion GBK, jenis olah raga yang dilakukan adalah *running*, *jogging*, dan *cycling*. Setelah sesi olah raga, dilanjutkan dengan santap kuliner khas Betawi, diantaranya kerak telur, kue pancong, kue rangi, kopi, dan lain-lain diiringi dengan *live music* keroncong Betawi dan orkes gambang kromong serta dalam hiasan ornamen ondel-ondel khas betawi. Sesi *social program* diakhiri dengan pelepasliaran burung di area hutan kota GBK. Dalam kesempatan ini para delegasi juga berkesempatan untuk *refreshing* serta berbincang dalam suasana yang lebih santai.

Pengenalan Budaya Indonesia

Dalam rangkaian kegiatan FCBD/FMCBG Meeting ini, juga berupaya untuk memperkenalkan berbagai macam budaya Indonesia. Bentuk pengenalan budaya yang dilakukan antara lain adalah desain *booth* pameran dalam *venue meeting* berbentuk Rumah Adat Jawa (Rumah Joglo), Rumah Adat Sumatera (Rumah Gadang), Rumah Adat Nusa Tenggara (Rumah Sasak), dan Rumah Adat Sulawesi (Rumah Walewangko). Pengenalan



budaya Indonesia juga dilakukan dalam sesi olah raga pagi dengan menyuguhkan ornamen khas betawai serta menghadirkan makanan khas betawai sepanjang sesi tersebut. Selain itu, dalam pertunjukan seni yang dilakukan dalam kegiatan *hospitality dinner* juga mengusung budaya Indonesia yaitu tentang pertunjukan wayang dan tarian daerah.

Pengenalan budaya bangsa tersebut diharapkan bisa menjadi media promosi pariwisata bagi Indonesia serta dapat menarik minat delegasi untuk mengajak orang di negaranya untuk berwisata ke Indonesia menikmati suguhan budaya Indonesia.

Keterlibatan Pengusaha Kecil/Mikro

Sebagai bentuk komitmen dalam memajukan perekonomian masyarakat khususnya bagi pengusaha kecil/mikro, dalam pelaksanaan kegiatan 2nd FCBD Meeting dan 1st FMCBG Meeting yang dilaksanakan 15-18 Februari 2022, Kementerian Keuangan selaku *host* memberikan kesempatan kepada para pengusaha kecil/mikro untuk dapat terlibat dalam acara tersebut dengan menyediakan *booth* pameran yang dapat diakses oleh para delegasi perwakilan berbagai negara diantara sesi FCBD/FMCBG Meeting. Sekitar

28 pengusaha kecil/mikro terlibat langsung dalam acara serta produknya di pameran sepanjang kegiatan tersebut. Pengusaha kecil/mikro yang terlibat merupakan pengusaha binaan dari Kemenkeu, BI, dan LPEI.

Pameran produk UMKM ini bertujuan sebagai media promosi dan memperkenalkan berbagai produk UMKM dari Indonesia serta untuk menarik minat para delegasi untuk berbelanja dan berinvestasi dalam berbagai perusahaan mikro/kecil tersebut.

Recover Stronger, Recover Together

Tema "*Recover Stronger, Recover Together*" yang diusung dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini bertujuan mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah kita seluruh elemen masyarakat Indonesia mari bahu-membahu turut mendukung Indonesia untuk pulih dari keterpurukan salah satunya yang disebabkan oleh pandemi dan tumbuh lebih kuat menjadi bangsa yang besar.

Teks: Gayuh Ardhi

Foto: g20.org



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022: Babak Baru Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

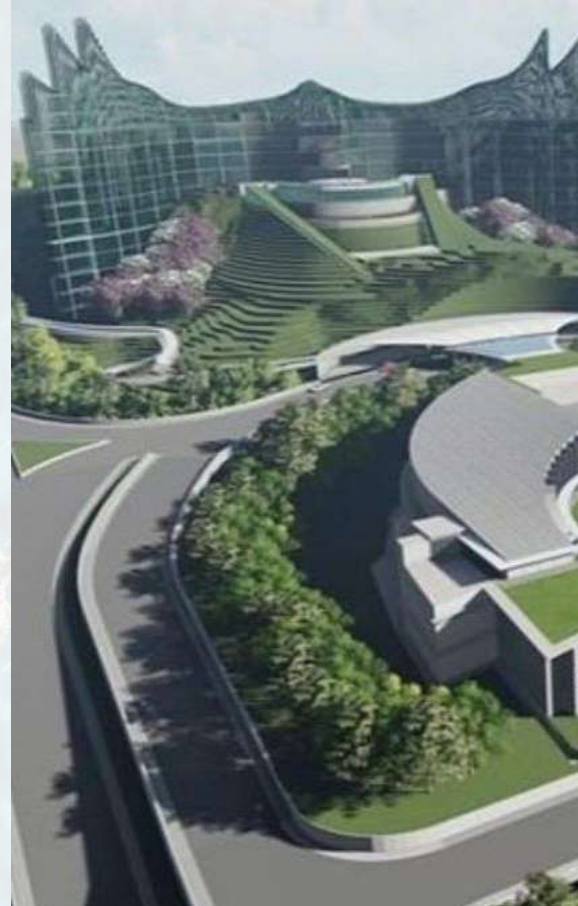
Pada tanggal 15 Februari 2022, Presiden RI, Joko Widodo, mengesahkan dan menetapkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022. Dengan disahkannya RUU IKN maka pemerintah akan memulai babak baru dalam pembangunan ibu kota negara. Dalam pasal 1 ayat 2 UU IKN nomor 3 tahun 2022 menetapkan bahwa ibu kota negara adalah Nusantara yang merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Selanjutnya pada pasal yang sama pada ayat 9, disebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”.

Berdasarkan pasal ini maka Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan khusus dalam mempersiapkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Termasuk di dalamnya adalah wewenang selaku pengguna barang terkait dengan pengelolaan barang milik negara (BMN) dan aset dalam penguasaan (ADP) Otorita Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya dalam pasal 32 UU IKN bahkan diatur mengenai pengalihan barang milik daerah (BMD) yang berada di ibu kota Nusantara kepada pemerintah pusat dan selanjutnya ditetapkan sebagai BMN dan/atau ADP Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagaimana Nasib Aset Pemerintah (BMN) di DKI Jakarta?

Dalam UU IKN pasal 27 dan 28 ayat 2 diatur mengenai tata kelola BMN di ibu kota negara lama (DKI Jakarta). BMN yang berada di ibu kota lama dapat ditata kelola melalui dua mekanisme yaitu pemindahtanganan dan pemanfaatan.



BMN yang dapat dipindahtanganan adalah BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara. Dalam pemindahtanganan terdapat pengecualian untuk BMN tertentu terkait cagar budaya, sejarah, dan nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Proses pemindahtanganan BMN yang diatur dalam UU IKN dilakukan dengan mekanisme yang lebih ringkas yaitu tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 29 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa untuk BMN dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan menteri keuangan dan untuk BMN dengan nilai di atas seratus miliar rupiah dilakukan dengan persetujuan Presiden.

Pemanfaatan BMN di ibu kota lama dapat dilakukan dengan berbagai alternatif yaitu antara lain sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS)/bangun serah guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). Pelaksanaan sewa dilakukan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat





gedung Rp63,1T, dan rumah negara Rp3,6T. Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh Encep Sudarwan selaku Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara dalam *Focus Group Discussion* Pengelolaan BMN IKN Nusantara dan BMN di Jakarta Paska Pemindahan Ibu kota terdapat potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN di DKI Jakarta. Pada pemaparan tersebut disebutkan bahwa estimasi kontribusi pemanfaatan dari BMN per tahunnya adalah Rp4,66T dan pemindahtanganan per tahunnya adalah sebesar Rp21,6T. Khusus BMN berupa rumah negara yang sudah tidak dibutuhkan oleh kementerian/lembaga (K/L) untuk pengelolaannya akan dialihkan kepada K/L yang membutuhkan atau dilakukan pencabutan statusnya sebagai rumah negara untuk kemudian dilakukan pemindahtanganan atau pemanfaatan.

dilakukan pembayaran uang sewa secara sekaligus atau bertahap. Dalam hal kerja sama pemanfaatan sendiri dilakukan dengan mekanisme *revenue sharing* dengan jangka waktu maksimal 50 tahun.

Saat ini di DKI Jakarta memiliki terdapat BMN dengan total Rp1.464,1 T dengan rincian BMN tanah sebesar Rp1.396,4T, bangunan

Tata Kelola BMN di Ibu Kota Nusantara

Visi yang digaungkan dalam ibu kota baru adalah kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Selain itu kota baru ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan representasi dari

keberagaman bangsa Indonesia. Wilayah ibu kota negara akan meliputi wilayah daratan seluas 256.142 hektar yang di dalamnya meliputi Kawasan Ibu Kota Nusantara seluas 56.180 hektar dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas 199.962 hektar.

Dalam penyusunan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Ibu Kota Nusantara maka akan mengikuti rencana induk IKN dan standar barang standar kebutuhan (SBSK). SBSK BMN Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Otorita IKN setelah berkoordinasi dengan K/L teknis terkait dan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Dalam hal penggunaan BMN di Ibu Kota Nusantara untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan K/L tertentu. K/L tertentu dijabarkan sebagai K/L yang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, kesekretariatan negara, yustisi, dan fiskal. Selain K/L tertentu tersebut Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menjadi Pengguna Barang dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dalam mendukung Ibu Kota Nusantara, dalam rangka efektivitas pengelolaan BMN di Ibu Kota Nusantara, dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk selain K/L tertentu dapat menjadi Pengguna Barang namun hanya atas BMN selain tanah/bangunan untuk kepentingan K/L yang bersangkutan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan langkah besar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua diharapkan dapat memberikan kemaslahatan. Lewat prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas diharapkan kemaslahatan yang diberikan tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi dunia.

Teks: Aldy Wirmadi

Foto: voi.id



Memahami Upah Kuproy Bangunan

Di Indonesia, ada suatu profesi yang digeluti oleh lebih dari 8 juta orang, namun selalu dikategorikan sebagai pekerja informal yaitu kuli proyek bangunan. Profesi dengan nama keren kuproy ini mempunyai mempunyai sifat unik sehingga selalu masuk kategori pekerja informal dimana pun mereka bekerja. Seorang kuproy, walau bekerja di proyek bangunan pemerintah, tidak pernah memiliki kontrak sah dengan kontraktor (Rahardjo & Bermawi, 2014), kontraktor manapun selalu menempatkan kuproy sebagai pekerja lepas (Stevia L. & Soemardi, 2016). Di sisi pembayaran, kontraktor mendelegasikan distribusi upah kuproy kepada mandor sebagai koordinator sekaligus *supplier* kuproy (Lukiyanto et al., 2015a).

Sebagai pekerja informal, aturan UMR tidak berlaku bagi kuproy. Dalam proyek konstruksi, mekanisme pasar dan posisi pekerja menentukan upah. Semakin banyak pasokan kuproy, daya tawar upah mereka semakin rendah. Begitu juga dengan urutan posisi di proyek, semakin rendah kelas kuproy, semakin sedikit pula upahnya. Urutan posisi kuproy dari upah terendah adalah laden (pembantu), tukang, tukang senior, dan mandor (*foreman*). Jika peraturan UMR melindungi kuproy, upah pokok seorang laden minimal seharusnya akan sebesar dengan UMR. Namun, karena kuproy selalu diposisikan sebagai pekerja informal, upah kuproy ditentukan oleh upah pasar kompetitif yang dibentuk oleh penawaran dan permintaan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan persaingan harga.

Tinggi rendahnya UMR dapat berpengaruh terhadap upah kuproy. Di ranah teori, para ekonom berbeda pendapat tentang hubungan antara UMR di sektor formal dengan upah pekerja di sektor informal. Dengan pendekatan *partial equilibrium*, para ekonom berteori bahwa semakin tinggi UMR di suatu daerah, maka upah di sektor informal akan semakin rendah. Penurunan upah tersebut terjadi karena pengurangan pekerja sektor formal akibat naiknya UMR. Pekerja sektor formal yang di-PHK beralih menjadi pekerja di sektor informal. Melimpahnya jumlah pekerja di sektor informal akan menurunkan harga pasar upah informal. Di sisi lain, dengan pendekatan *general equilibrium*, para ekonom menyatakan bahwa meningkatnya UMR di sektor formal akan menaikkan upah di sektor informal juga.



Berangkat dari fakta awal berupa beragamnya UMR dan variatifnya upah kuproy di berbagai daerah di Indonesia, kami telah menguji hubungan antara karakteristik lokasi proyek dan upah kuproy. Dalam menguji hubungan tersebut, kami menggunakan *dataset* BPS yang berisi karakteristik lokasi yang salah satunya adalah variabel UMR sebagai faktor-faktor penentu harga pasar upah kuproy. Sedangkan data upah kuproy kami kumpulkan dari dokumen penawaran harga kontraktor pada paket pengadaan konstruksi Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Hasil penelitian kami mengenai UMR dan upah kuproy dengan judul "*Minimum Wages And Construction Workers Earning In Indonesia*" juga telah dipublikasikan di Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 8 Nomor 2, November 2021. Pada artikel ini, kami akan menyampaikan ikhtisar dan berbagai temuan dari artikel ilmiah tersebut.

1. Karakteristik Kuproy di Indonesia

Awalnya, kuproy di Indonesia merupakan pekerjaan musiman bagi petani Jawa di sela waktu tanam dan panen. Di sela waktu tanam, para petani mengikuti mandor untuk bekerja pada proyek bangunan di kota. Setelah proyek bangunan selesai, para kuproy akan kembali lagi menggarap lahan pertanian di desa mereka. Seiring makin sempitnya lahan pertanian di Jawa akibat alih fungsi lahan, kuproy berangsur-angsur tidak lagi menjadi pekerjaan musiman. Para kuproy dengan latar belakang petani Jawa yang kehilangan lahan pertanian akhirnya menjadikan profesi kuproy sebagai pekerjaan tetap. Namun, karena rendahnya pendidikan dan kompetensi, para eks-petani ini bekerja dari proyek satu ke proyek lain sebagai pekerja lepas tanpa kontrak kerja yang legal (Soemardi, 2011).

Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi kuproy di Indonesia tercermin dari data BPS (2020a) yang memperlihatkan bahwa 44,13% kuproy hanyalah lulusan SD. Dari sisi kompetensi, BPS (2020a) mencatat bahwa

dari 8 juta kuproy, hanya sekitar tujuh ratus ribuan yang bersertifikat kompetensi kerja. Angka-angka ini seolah menjadi latar belakang mengapa para kontraktor selalu menempatkan kuproy sebagai pekerja lepas dan informal.

Kuproy di Indonesia bekerja di suatu proyek konstruksi tanpa ikatan kontrak yang legal. Supaya bisa bekerja di sebuah proyek bangunan, kuproy harus bergabung dengan mandor. Rahardjo & Bermawi (2015) menyatakan bahwa mandor proyek mengoordinasi sejumlah kuproy untuk bekerja pada suatu waktu, lokasi, dan pekerjaan tertentu pada sebuah proyek konstruksi. Hampir setiap item pekerjaan mempunyai mandor. Ada mandor besi untuk pekerjaan besi, mandor galian untuk pekerjaan galian, mandor cat, dan lainnya. Kesepakatan besaran upah dan jenis pekerjaan antara mandor dan kuproy juga dilakukan melalui cara tradisional, misalnya melalui persetujuan dan kesanggupan lisan (Lukiyanto et. al, 2015a). Walaupun perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum ketika terjadi sengketa, sejauh ini tidak pernah ada upaya yang dibuat oleh kuproy dan mandor untuk melegalkan kesepakatan kerja mereka (Lukiyanto et. al, 2015a).

2. Upah Kuproy di Proyek Konstruksi Pemerintahan

Perusahaan Konstruksi umumnya menggunakan dua jenis pekerja, yaitu pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal adalah pekerja yang berasal dari dalam perusahaan, dan jam kerjanya *full time*. Para pekerja ini memiliki jalur karir dalam struktur perusahaan, dan mereka umumnya dibayar secara bulanan. Contoh posisi pekerja formal

di perusahaan konstruksi adalah *Project Manager*, *Site Operational Manager*, dan *Site Administration Manager*. Sedangkan pekerja informal adalah pekerja lepas di luar struktur perusahaan. Pekerja lepas inilah yang menduduki posisi sebagai kuproy, yang bekerja tanpa kontrak resmi, dan bayarnya berdasarkan hitungan harian melalui mandor.

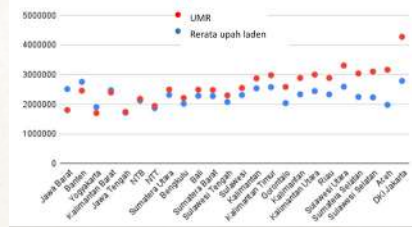
Upah kuproy memiliki porsi yang cukup signifikan dalam anggaran proyek. Stevia Lukmanasari & Soemardi (2016) menyebutkan bahwa sekitar 30% anggaran proyek konstruksi dihabiskan untuk membayar kuproy. Pada paket pengadaan konstruksi di pemerintahan, biasanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan komponen upah pekerja dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan UMR. Sementara itu, kontraktor yang menjadi peserta tender umumnya menawar harga dengan komponen upah pekerja sesuai harga pasar. Pada banyak paket pengadaan, harga pasar upah kuproy yang menjadi referensi kontraktor jauh di bawah UMR. Karena porsi upah pekerja dalam proyek cukup besar, maka ketika kontraktor menggunakan harga upah pasar, penawaran bisa menjadi lebih rendah dari 80% HPS dan menjadi objek evaluasi kewajaran harga.

Pada saat kontraktor menjadi objek evaluasi kewajaran harga, kontraktor harus bisa membuktikan bahwa harga satuan upah dalam harga penawaran menggunakan harga pasaran. Apabila kontraktor tidak bisa membuktikan kebenaran harga satuan upah, maka panitia tender dapat menggugurkan penawaran kontraktor dengan alasan harga penawaran tidak wajar.



Berdasarkan data pada paket konstruksi di Kementerian Keuangan TA 2020, dari 717 sampel yang berasal dari 24 provinsi, rata-rata upah laden per bulan (25 hari kerja) adalah Rp2.384.799,65. Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata upah laden tertinggi dibanding provinsi lain, yaitu Rp2.790.577,37 per bulan, sedangkan rata-rata upah laden terendah dipegang oleh Provinsi Jawa Tengah dengan Rp1.719.833,33 per bulan.

Walaupun Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki rata-rata upah laden tertinggi, namun ketimpangannya dengan UMR ternyata cukup lebar. Data pada penelitian kami menunjukkan bahwa UMR di hampir seluruh provinsi masih lebih tinggi dari upah laden per bulan, dengan tingkat ketimpangan (*gap*) yang bervariasi.



3. Data dan Metode Penelitian

Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara UMR dan upah pekerja bangunan. Biasanya, penelitian dengan tema UMR dan upah sektor informal menggunakan dataset dari IFLS (*Indonesian Family Life Survey*) dan BPS. *Dataset* dari IFLS dan BPS tidak menyediakan informasi mengenai upah sektor informal dengan jenis pekerjaan yang spesifik. Pada penelitian ini, kami menggabungkan *dataset* dari BPS dan data dari paket pekerjaan konstruksi Kemenkeu. Penggabungan *dataset* tersebut memungkinkan kami untuk melakukan analisis hubungan antara UMR dengan upah pekerja bangunan.

Kami menggunakan *dataset* BPS tahun 2020 untuk variabel upah minimum dan karakteristik lokasi proyek konstruksi. Sedangkan data upah kuproy kami ambil dari *dataset* pengadaan konstruksi Kementerian Keuangan TA 2020. Sampel penelitian ini terdiri dari 717 upah

pekerja dari 62 proyek konstruksi di 24 provinsi di Indonesia. Meskipun proyek konstruksi tidak mencakup seluruh provinsi di Indonesia, sampel dianggap telah mewakili seluruh provinsi di Indonesia (24 dari 34 provinsi).

Dalam memahami hubungan antara UMR dan upah kuproy, penelitian kami menggunakan 2 (dua) variabel dependen: (i) Ketimpangan upah dan (ii) upah laden. Ketimpangan upah adalah jarak antara upah laden di tiap proyek dan UMR di lokasi proyek. Dalam penelitian, kami menggunakan variabel upah laden karena laden adalah kuproy yang mendapat upah terendah.

Untuk mengontrol latar belakang sosial ekonomi upah kuproy, penelitian yang kami lakukan mengambil variabel-variabel yang bisa menjelaskan karakteristik lokasi proyek bangunan. Mengikuti studi Siregar (2019), variabel sosial ekonomi yang kami gunakan adalah: PDB per provinsi, proporsi pekerja formal, jumlah penduduk usia kerja, dan jumlah pekerja informal pada sektor non-pertanian. Variabel produktivitas pekerja sebagai hasil bagi antara PDB dan jumlah pekerja per provinsi juga kami tambahkan sebagai variabel sosial ekonomi.

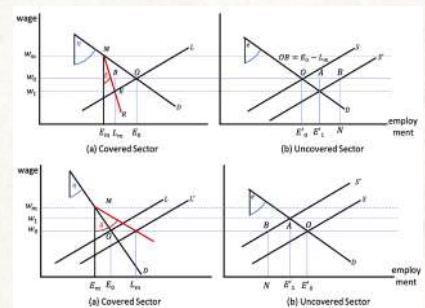
4. Analisis

Dengan menggunakan 717 observasi yang berasal dari proses tender konstruksi yang kompetitif, kami berhasil menemukan hubungan antara UMR dan upah informal. Dalam model empiris, kami memasukkan karakteristik lokasi di tingkat provinsi sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol berhasil menjadikan hubungan antara upah minimum dan upah informal signifikan secara statistik. Selain itu, karakteristik lokasi juga mampu membantu dalam menjelaskan beragamnya nilai upah kuproy antar provinsi yang memiliki nilai UMR yang hampir sama.

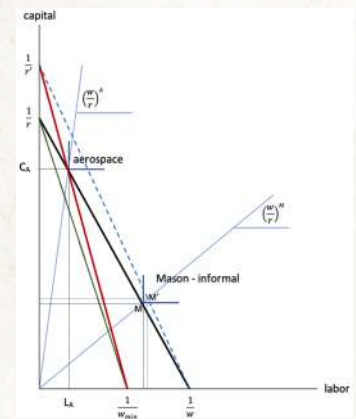
Seorang laden dalam suatu proyek konstruksi memiliki posisi paling rendah dan berpenghasilan paling rendah dibandingkan dengan kuproy lainnya. Oleh karena itu, upah

laden merupakan parameter yang sesuai untuk membandingkan upah pasar kuproy dan UMR. Hasil regresi menunjukkan bahwa UMR memiliki hubungan positif dengan upah pasar kuproy dan ketimpangan upah.

Dalam teorema dualisme pasar tenaga kerja dengan pendekatan *partial equilibrium* (Welch 1974 dan Mincer 1976), mobilitas pekerja merupakan penyebab utama naik atau turunnya upah informal. Ketika upah minimum yang lebih tinggi diikuti dengan mobilitas pekerja dari sektor formal ke sektor informal, upah sektor informal kemudian turun dan *output*-nya meningkat. Begitu pula sebaliknya, upah sektor informal naik, dan *output* menyusut.



Sedangkan dalam pendekatan *general equilibrium* (Carruth & Oswald 1981, Leamer 1995, dan Harrison & Leamer 1997), jumlah *output*-lah yang menyebabkan perubahan upah informal. Jika UMR baru diikuti oleh bertumbuhnya *output* sektor informal, maka upah sektor informal akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika peraturan UMR diikuti dengan pengurangan kegiatan informal, maka upah pekerja informal akan turun.



Hasil regresi kami menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara UMR, ketimpangan upah, dan upah laden. Temuan ini menggambarkan beberapa hal penting mengenai upah dan UMR. Pertama, UMR yang lebih tinggi menguntungkan bagi pekerja sektor formal maupun informal. Kedua, sektor formal lebih diuntungkan dari UMR yang lebih tinggi, karena semakin tinggi UMR di suatu provinsi, makin lebar pula ketimpangan upah sektor formal dan informal. Ketiga, tingkat UMR berkorelasi dengan pertumbuhan kegiatan konstruksi.

Menurut teori *general equilibrium*, pertumbuhan *output* adalah penyebab utama kenaikan upah di sektor informal. Hubungan yang positif dan signifikan antara UMR, ketimpangan upah, dan upah laden menunjukkan bahwa makin tinggi UMR di suatu daerah, makin berkembang pula kegiatan/*output* konstruksinya.

Temuan empiris kami menunjukkan bahwa pendekatan *general equilibrium* lebih cocok untuk menjelaskan dualisme pasar tenaga kerja di Indonesia. Hubungan antara upah formal dan informal lebih mudah dipahami dengan menggunakan diagram Harrison & Leamer (1997) yang menunjukkan arah yang selaras antara upah formal dan informal. Sebagai negara berkembang dengan tingkat penegakan hukum ketenagakerjaan yang rendah, turunnya harga kapital yang mengikuti kenaikan UMR akan menumbuhkan ekonomi informal dan mensejahterakan pekerja informal Indonesia.

Dalam teorema pendekatan *partial equilibrium*, Welch (1974) dan Mincer (1976) berpendapat bahwa upah formal dan informal berjalan berlawanan arah, kecuali bila ada kondisi yang menyebabkan mobilitas pekerja ke sektor formal. Kondisi tersebut adalah tingkat lowongan kerja yang tinggi dan permintaan yang tidak elastis di sektor formal. Mobilitas pekerja ke sektor formal membuat kelangkaan tenaga kerja di sektor informal. Kelangkaan ini kemudian menggerakkan upah informal

ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, konsep ini tidak sesuai untuk menjelaskan temuan kami, karena sulitnya menghitung tingkat lowongan kerja, elastisitas permintaan, dan mobilitas tenaga kerja antar sektor dari survei ekonomi tahunan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa poin:

- Variasi upah kuproy antar provinsi mengikuti variasi UMR. Namun, penghasilan dasar pekerja konstruksi bukanlah UMR, tetapi upah pasar.
- Besaran PDB dan produktivitas pekerja di suatu provinsi tidak berhubungan dengan pendapatan pekerja konstruksi. Temuan ini menunjukkan tren bahwa produktivitas pekerja konstruksi di seluruh wilayah kurang lebih sama.
- Tingkat formalitas di suatu provinsi menunjukkan hubungan positif terhadap upah buruh bangunan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa UMR yang lebih tinggi tidak merugikan pendapatan sektor informal.
- Kurang beragamnya variasi upah kuproy antar provinsi meneguhkan temuan Soemardi (2011) bahwa sifat pekerja konstruksi adalah berpindah dari satu proyek ke proyek lain, lintas kota, sebagai pekerja paruh waktu.
- Terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menyadari bahwa upah pokok untuk pekerja konstruksi secara umum lebih kecil dari UMR. Oleh karena itu, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih baik menggunakan upah pasar sebagai dasar perkiraan harga daripada UMR. Memanfaatkan upah pasar sebagai dasar nilai HPS akan meningkatkan kualitas estimasi harga dan mendorong persaingan yang lebih ketat antar kontraktor.

Teks: M. Iqbal Mutaqin, Choirul En Huda

Foto: tirtoid, liputan6, kompasiana



Kegagalan pada Proses Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi

Salah satu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang krusial adalah berhubungan dengan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yang dibiayai oleh keuangan negara. Mengingat pentingnya PBJ pemerintah maka dibutuhkan aturan atau regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan PBJ pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya yaitu efisiensi, efektif, transparan, persaingan sehat, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Presiden (PP) nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jasa konsultan adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa konsultansi dibagi menjadi konstruksi dan non-konstruksi. Pembagian ini dibedakan berdasarkan bentuk pekerjaan dan *output* yang dihasilkan, untuk konsultan konstruksi

dapat berupa konsultansi perencanaan dan pengawasan sedangkan konsultan non-konstruksi dapat berupa kajian atau produk hukum dan lainnya. Intinya jasa konsultansi memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan bidang jasa yang diperlukan. Hal ini, tergambar dalam aturan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan jasa konsultansi yang menyaratkan 60% atau lebih merupakan mata pembayaran personil dari tenaga ahli yang dibutuhkan.

Kementerian/Lembaga Pemerintahan menggunakan jasa konsultansi non-konstruksi untuk memenuhi kegiatannya antara lain di bidang transportasi, telematika, kepariwisataan, perindustrian, perdagangan, pertambangan, energi, keuangan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, serta rekayasa industri. Umumnya pengadaan penyedia konsultan menggunakan asosiasi Inkindo dan Perkindo sebagai acuan atau referensi untuk bidang dan sub bidang, serta tenaga ahli yang dibutuhkannya.

Pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi tidak setenar dengan pengadaan jasa konsultan konstruksi. Hal ini terlihat pada banyaknya penyedia yang mengikuti seleksi untuk jasa konsultansi konstruksi lebih banyak dibandingkan dengan penyedia pada jasa konsultansi non-konstruksi. Sebenarnya, konsultan non-konstruksi memiliki peluang usaha yang cukup besar. Nilai paket jasa konsultan non-konstruksi bahkan bisa lebih besar dibanding jasa konsultansi konstruksi.



Pengadaan jasa konsultan non-konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Jasa rekayasa (*engineering*);
2. Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, seperti:
 - transportasi;
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - kehutanan;
 - perikanan;
 - kelautan;
 - lingkungan hidup;
 - kedirgantaraan;
 - pengembangan usaha;
 - perdagangan;
 - pengembangan SDM;
 - pariwisata;
 - pos dan telekomunikasi;
 - pertanian;
 - perindustrian;
 - pertambangan; dan/atau
 - energi.
3. Jasa keahlian profesi, seperti:
 - jasa penasehatan;
 - jasa penilaian;
 - jasa pendampingan;
 - bantuan teknis;
 - konsultan manajemen; dan/atau
 - konsultan hukum.
4. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.

Pengadaan Jasa konsultan menggunakan metode pemilihan seleksi dan penunjukan langsung. Metode seleksi yaitu proses pemilihan calon penyedia yang akan ditunjuk melakukan pekerjaan jasa konsultansi yang akan dilaksanakan. Sedangkan Penunjukan Langsung, calon penyedia yang dipilih yaitu dari daftar penyedia instansi pengguna.

Metode evaluasi jasa konsultan menggunakan metode Kualitas: yaitu menilai ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi



Perorangan, contohnya Konsultan hukum. Metode berikutnya adalah Pagu Anggaran yaitu menilai ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Penilaian kualifikasi pada pengadaan jasa konsultansi biasanya menggunakan metode pra kualifikasi, namun untuk jasa konsultansi perseorangan dapat menggunakan metode paska kualifikasi.

Jenis Kontrak dan Metode Evaluasi Pengadaan Jasa Konsultan Non-Konstruksi adalah:

1. Lumsum untuk pekerjaan yang semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak (contoh: perencana gedung, pembuatan aplikasi komputer);
2. Waktu Penugasan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan (contoh: pengawasan pembangunan gedung, penasehatan); dan
3. Kontrak Payung untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani (contoh: konsultan hukum, jasa audit, konsultan IT).

Pengadaan Jasa Konsultansi non Konstruksi melalui seleksi dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada unit instansi terkait berdasarkan permintaan pengadaan dari *user* atau

penyedia. Prosesnya dilakukan dengan mengundang beberapa perusahaan jasa konsultan non konstruksi untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan dan merealisasikan proyek atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kenyataannya, pelaksanaan seleksi memunculkan peluang gagal yang berbeda pada beberapa perusahaan yang mengikuti. Kasus yang sering terjadi dalam proses pengadaan jasa konsultan, antara lain:

1. Dalam dokumen pengadaan tidak dijelaskan secara rinci kriteria penilaian dan tidak cermat atau teliti dalam melakukan evaluasi (contoh: tidak merinci kriteria pengalaman personil inti);
2. Penyampaian data yang tidak benar terkait dengan pengalaman perusahaan, pengalaman personil inti, SKA/SKTK, ijazah personil inti, tanda tangan (pimpinan perusahaan, personil inti, maupun pemberi surat keterangan pengalaman kerja);
3. POKJA pemilihan tidak melakukan evaluasi atas kebenaran *billing rate* personil inti;
4. Personil konsultan tidak melakukan survei lapangan;
5. Peralatan tidak seluruhnya dimobilisasi;
6. Pergantian personil inti tidak sesuai prosedur;
7. Pekerjaan disubkontrakkan tanpa perjanjian; dan
8. Hasil pekerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.



Dari gambaran kasus yang sering terjadi dalam jasa konsultan tersebut diatas, maka sering terjadi kegagalan pada proses seleksi jasa konsultansi non konstruksi. Banyaknya penawaran yang gugur pada tahap seleksi, penyebab yang paling dominan dalam penawaran sehingga terjadinya gugur dalam penawaran.

- Faktor yang menjadi hambatan sehingga banyak penawaran yang gugur pada tahap seleksi
 1. Penyedia tidak membaca secara teliti dan memahami isi dokumen pengadaan;
 2. Penyedia tidak menggunakan fasilitas pemberian penjelasan dengan baik untuk mengetahui hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau ragu dalam membuat dokumen penawaran;
 3. Dokumen pengadaan yang dibuat oleh Pokja Pemilihan di UKPBJ tidak lengkap atau multitafsir; atau
 4. Kerangka Acuan Kerja/ Spesifikasi teknis tidak menggambarkan *output* yang diinginkan oleh pengguna jasa. Pada jasa konsultansi non konstruksi Persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis sudah diatur di regulasi, kita hanya memfilter pengalaman perusahaan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli tidak menambahkan item lainnya.

- Penyebab yang paling dominan dalam penawaran sehingga terjadinya gugur dalam penawaran
 1. Kualifikasi penyedia tidak sesuai;
 2. Pengalaman perusahaan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan tidak sesuai;
 3. Pengalaman tenaga ahli yang disyaratkan tidak sesuai atau kurang memenuhi; dan
 4. Dokumen penawaran tidak lengkap.
- Kriteria yang diperlukan agar penawaran memenuhi syarat dalam dokumen pengadaan
 1. Penyedia hendaknya memahami terlebih dahulu persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengunggah atau tidak terpenuhinya syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
 2. Penyedia jasa hendaknya memahami kriteria evaluasi pada seleksi jasa konsultan non konstruksi, sehingga dapat memprediksi kemungkinan nilai yang diperoleh untuk dapat memaksimalkan kualitas dokumen penawaran yang akan diunggah. Bagi pengguna jasa hendaknya dapat menerapkan peraturan dan memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pengadaan jasa konsultansi non konstruksi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi atau rekomendasi yang baik.
2. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran,

metode pembayaran dan ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang bersangkutan. harga yang telah disepakati telah dibandingkan dengan daftar harga (*price list*), analisa biaya yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional), harga pasar yang berlaku, Harga Perkiraan Sendiri dan harga kontrak pekerjaan yang sejenis sebelumnya di tempat pemberi kerja.

3. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri
 - HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok yaitu; Biaya Personil (*remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*direct reimbursable cost*).
 - Dalam Penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti; pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain
 - Pembuat/penyusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi antara lain, memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan, menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan, memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan mengetahui mana yang paling efisien, tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi, diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi.



HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap HPS dan KAK seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli (*person-month*), satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan dan keluaran/*output* yang dihasilkan serta tidak melampaui pagu anggaran yang dipertanggungjawabkan secara keahlian.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi hambatan sehingga banyak penawaran yang gugur pada tahap seleksi adalah penyedia tidak membaca secara teliti dan memahami isi dokumen pengadaan, penyedia tidak menggunakan fasilitas pemberian penjelasan untuk mengetahui hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau ragu dalam membuat dokumen penawaran, dokumen pengadaan yang dibuat oleh Pokja Pemilihan di UKPBJ tidak lengkap atau multitafsir, Kerangka Acuan Kerja tidak menggambarkan *output* yang diinginkan oleh pengguna jasa.
2. Penyebab yang paling dominan dalam penawaran sehingga terjadinya gugur dalam penawaran adalah kualifikasi penyedia tidak sesuai, pengalaman perusahaan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan tidak sesuai, pengalaman tenaga ahli yang disyaratkan tidak sesuai atau kurang memenuhi, dokumen penawaran tidak lengkap.
3. Kriteria yang diperlukan agar penawaran memenuhi syarat dalam dokumen pengadaan:
 - Penyedia hendaknya memahami terlebih dahulu persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengunggah atau tidak terpenuhinya syarat

yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

- Penyedia jasa hendaknya memahami kriteria evaluasi pada seleksi jasa konsultan non konstruksi, sehingga dapat memprediksi kemungkinan nilai yang diperoleh untuk dapat memaksimalkan kualitas dokumen penawaran yang akan diunggah.
 - Bagi pengguna jasa hendaknya dapat menerapkan peraturan dan memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pengadaan jasa konsultansi non konstruksi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan.
4. Terkait dengan aspek usaha, seharusnya para penyelenggara jasa konsultansi non konstruksi bersama-sama menggarap pasar yang ada dan melakukan edukasi agar bisnis dalam bidang jasa konsultansi semakin menarik prospeknya. Meskipun peluang pasarnya sangat besar, namun belum memiliki landasan hukum yang kuat, hal ini dikarenakan Undang-Undang yang mengaturnya belum ada. Akibatnya, banyak pekerjaan diambil oleh konsultan asing. Regulasi bidang jasa konsultansi non konstruksi perlu dibenahi. Alasannya beragam. Di antaranya, tidak berpihak kepada pengembangan jasa konsultansi, tidak ada pengaturan tentang segmentasi pasar, belum ada jaminan kepastian legalitas, SBU Non Jasa Konstruksi perlu disesuaikan dengan UU No 20 Tahun 2014 dan meningkatnya risiko kegagalan pelaksanaan pekerjaan.

Teks: Yelly Metasari

Foto: pexels.com

Srikandi Kemenkeu dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dibalik Presidensi G20 2022

Hai, Sobat PASTI! Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi *Group of Twenty* (G20) selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.

Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak ada sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada *Riyadh Summit*

2020, Indonesia mengetuai presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021).

Presidensi G20 mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Seiring integrasi perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara akan dapat bertahan lama apabila diikuti keberhasilan yang sama di negara-negara lain. Melalui G20, Indonesia dapat mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.

Apa itu *Group of Twenty* (G20)? G20 merupakan sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80 persen perekonomian dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia. Dimulai sejak tahun 1999 sebagai pertemuan di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan G20 semakin intens dilaksanakan dengan KTT tahunan yang diikuti oleh masing-masing Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Hingga saat ini, rangkaian Pertemuan G20 Presidensi 2022 berjumlah 150 kegiatan yang terdiri dari Pertemuan *Working Groups*, *Engagement Groups*, *Deputies/Sherpa*, *Ministerial*, dan KTT G20, serta *Side Events*. Tiga topik utama yang akan diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia adalah: (i) Sistem Kesehatan Dunia; (ii) Transformasi Ekonomi dan Digital; dan (iii) Transisi Energi.

Tentunya dalam penyelenggaraan kegiatan Presidensi G20 terdapat proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan.



Nah! Pada edisi kali ini, Tim Info Pasti akan mencari tahu apa peran Kementerian Keuangan khususnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dalam rangkaian kegiatan G20 ini, melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang terlibat sebagai koordinator dan anggota tim Teknis/Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Presidensi G20 Tahun 2022.

Siapa Sajakah Mereka?

- **Kus Puwanning Tiyas**

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa - Madya

- **Aditya Endah Pertiwi**

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa - Muda

- **Ima Zanu Setyaningrum**

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa - Muda

- **Veranita Sinaga**

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa – Muda

Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

Kus Puwanning Tiyas:

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Presidensi G20 tahun 2022, Pejabat Pembuat Komitmen perlu dibantu oleh tim teknis dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja lain dalam rangka pelaksanaan Presidensi G20 tahun 2022.

Veranita Sinaga:

Nah kami berempat adalah bagian dari tim Teknis/Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Presidensi G20 Tahun 2022 yang tugasnya memberikan bantuan teknis administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen selama pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap pelaksanaan pengadaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan, sampai dengan paska kegiatan berupa pemberian informasi atau masukan yang meliputi antara lain:

1. penyusunan dokumen pelaksanaan meliputi proses, kelengkapan, dan kesesuaian terhadap kerangka acuan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan
3. penyelesaian permasalahan di lapangan.

Aditya Endah Pertiwi:

Menambahkan, kami juga bertugas untuk menyusun laporan kegiatan Tim Teknis/Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Presidensi G20 Tahun 2022.

Ima Zanu Setyaningrum:

Karena kami berempat ini tim teknis pendukung PPK, maka kami bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Presidensi G20 tahun 2022. PPK dimaksud adalah Bapak Yan Inderayana (*Chief Data Management Officer* pada CTO, Sekretariat Jenderal)

Sampai Saat Ini, Kegiatan Apa Saja Yang Telah Dilaksanakan?

Kus Puwanning Tiyas:

Dalam kegiatan Presidensi G20 Tahun 2022 terdapat *Main Event* dan *Side Event*, dengan level kegiatan sesuai dengan jabatan peserta yang menghadiri kegiatan tersebut:

- **Working Group:** kegiatan dengan peserta setingkat Pejabat Eselon 2
- **Deputies:** kegiatan dengan peserta setingkat Pejabat Eselon 1
- **Minister:** kegiatan dengan peserta setingkat Menteri

Berikut beberapa kegiatan yang sudah terlaksana pada sampai dengan saat ini:

Main Event

- 1st *The Infrastructure Working Group (IWG)* - 19-21 Januari 2022 - Lokasi: Jakarta
- 1st *The Sustainable Finance Working Group (SFWG)* - 25 Januari 2022 - Lokasi: Jakarta
- 2nd *G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF)* - 26 Januari 2022 - Lokasi: Jakarta - Level: *Deputies*
- 2nd *Finance Central Bank Deputies (FCBD)* - 15-16 Februari 2022 - Lokasi: Jakarta - Level: *Minister*
- 1st *Finance Minister Central Bank Governor (FMCBG)* - 17-18 Februari 2022 - Lokasi: Jakarta - Level: *Minister*

- 2nd *IWG* - 17 Maret 2022 - Lokasi: Jakarta
- 2nd *SFWG* - 30-31 Maret 2022 - Lokasi: Jakarta
- 3rd *G20 JFHTF* - 1 April 2022 - Lokasi: Jakarta - Level: *Deputies*
- *FCBD Informal Meeting* - 12 April 2022 - Lokasi: Jakarta - Level: *Deputies*
- 2nd *FMCBG & Relay* - 20 April 2022 - Lokasi: Washington DC - Level: *Minister*
- 2nd & 3rd *Framework Working Group (FWG)* - 24-25 Mei 2022 - Lokasi: Jakarta
- 4th *G20 JFHTF* - 31 Mei 2022 - Lokasi: Jakarta - Level: *Deputies*
- 3rd *IWG* - 9-10 Juni 2022 - Lokasi: Bali
- 3rd *SFWG* - 14-15 Juni 2022 - Lokasi: Bali

Side Event

- *Hi-Level Seminar: Strengthening Global Health Architecture* - 17 Januari 2022 - Lokasi: Jakarta
- *The Global Partnership for Financial Inclusion (GPII) Parallel Event: Fintech Exhibition dan/atau Site Visit ke Sentra UMKM* - 11 Mei 2022 - Lokasi: Bali





- G20 Seminar: *Joining Forces for Recovery and a Safe, Sustainable Future* - 24 Mei 2022 - Lokasi: Jakarta
- High-Level Seminar: *Digital Infrastructure* - 9 Juni 2022 - Lokasi: Bali
- G20 Seminar: *International Policy Levers* - 13 Juni 2022 - Lokasi: Bali

Bagaimana Menghadapai Tantangan Yang Ada Dalam Pelaksanaan Tugas dalam Tim?

Kus Puwaning Tiyas:

Dalam melaksanakan tugas sebagai tim teknis/pendukung PPK ada beberapa fokus tugas yang kami lakukan yaitu terkait dengan *professional congress organizer*, Hotel, IT dan kesekretariatan. Tentu perlu adanya keselarasan dalam komunikasi yang baik dan pembagian tugas antar sesama tim.

Veranita Sinaga:

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan tentu nya ada pembagian PIC yang memudahkan kami dalam pembagian tugas perkerjaan yang ada.

Ima Zanu Setyaningrum:

Tentunya hambatan selalu ada bekerja sama dengan banyak orang untuk itu koordinasi yang intens menjadi penting rasanya agar adanya kesamaan persepsi dalam setiap menjawab permasalahan yang ada di dalam tim.

Aditya Endah Pertiwi:

Sebagai anggota tim kami harus siap sedia menghadapi perubahan yang begitu cepat dalam menjalankan tugas yang sangat dinamis ini. Komunikasi adalah kuncinya.

Bagaimana Rasanya Terlibat dalam Kegiatan Berskala Internasional?

Aditya Endah Pertiwi:

Saya bangga dan senang bisa terlibat dalam Presidensi G20, dimana dalam tugas ini membutuhkan usaha dan tanggung jawab yang besar, sehingga saya belajar untuk membagi waktu dengan tugas-tugas utama saya dalam pengadaan barang/jasa.

Ima Zanu Setyaningrum:

Saya sangat senang karena merupakan pengalaman pertama dengan tugas yang penuh dengan tantangan. Tentu banyak hal yang saya pelajari untuk saya gunakan dalam pekerjaan saya kedepan.

Kus Puwaning Tiyas:

Mendapat tugas ini saya bertemu dengan banyak pegawai Kemenkeu dari berbagai unit Eselon I sehingga memberikan pengalaman baru. Mendapatkan *point of view* yang baru karena sebelumnya bertugas dalam tim POKJA dan sekarang sebagai tim PPK.

Veranita Sinaga:

Terlibat dalam kegiatan Presidensi G20 ini membawa saya untuk pertama kalinya menginjakkan kaki ke negeri paman sam, tentu rasa senang saya rasakan. Banyak pengalaman baru, biasanya terlibat dalam tim POKJA dan kali ini sebagai tim PPK tentu menjadi tantangan buat saya pribadi. Dengan banyaknya kegiatan, membuat saya juga belajar untuk memperhatikan hal-hal detail terkait kebutuhan kegiatan tersebut.

Peran Biro Manajemen BMN dan Pengadaan di G20?

Kus Puwaning Tiyas:

Dalam kegiatan Presidensi G20 tahun 2022 telah dibentuk Panitia Pelaksana Rangkaian Pertemuan G20 bidang *Finance Track* dalam rangka mendukung rangkaian pertemuan

G20 Tahun 2022, yang tertuang dalam KMK Nomor 444/KMK.01/2021

Veranita Sinaga:

Salah satu tugas dalam kepanitiaan tersebut adalah sebagai POKJA, yang menyelenggarakan proses pengadaan barang/ jasa serta pengendalian kontrak yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 bidang *Finance Track*.

Ima Zanu Setyaningrum:

Bapak Edy Gunawan, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan bertugas sebagai Koordinator Pokja Bidang Pengadaan dan juga merangkap sebagai anggota pokja.

Aditya Endah Pertiwi:

Tidak hanya itu, Bapak Achmad Zikrulah, Kepala Bagian Manajemen Pengadaan serta dua orang kasubbag, juga terlibat pada Pokja Bidang Pengadaan dalam subbidang Pengendalian Pengadaan.

Kus Puwaning Tiyas:

Dan untuk rekan-rekan kami pegawai Biromadan yang tergabung dalam tim Teknis/ Pendukung PPK Presidensi G20 2022. Semua pegawai Biromadan pasti akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal agar pelaksanaan presidensi G20 dapat berjalan dengan baik.



Harapan Tim dan Masukan Untuk Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia Kedepannya Dengan Adanya Kegiatan G20?

Kus Puwaning Tiyas:

Menjadi bagian dari pelaksanaan G20 ini dengan berbagai kegiatan yang kami terlibat didalamnya, tentu kami ingin agar setiap delegasi atau peserta kegiatan merasa puas atau tidak ada keluhan dengan segala yang kami lakukan atau sediakan untuk acara-acara tersebut. Insan pengadaan Kemenkeu tentunya semakin diperkaya melalui pengalaman-pengalaman dalam kegiatan G20.

Veranita Sinaga:

Tentu dengan adanya G20, semoga Indonesia bisa menjadi penengah dan pemersatu bangsa internasional dari konflik yang ada. Saya juga berharap bahwa dengan terlibat di acara ini tim pengadaan Biromadan dapat belajar untuk mempersiapkan perencanaan yang matang mulai dari deskripsi kebutuhan secara detail dalam PBJ serta menentukan metode pengadaan juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pekerjaan. Semoga kedepannya tim pengadaan Kemenkeu memiliki sistem khusus terkait rincian barang/jasa yang sudah disepakati di kontrak, untuk mempermudah pemantauan kebutuhan

dan menghindari munculnya penambahan *item/volume* melebihi batas di kontrak.

Ima Zanu Setyaningrum:

G20 pasti akan membuat nama Indonesia harum di kancah internasional tentu dengan segala kegiatan yang coba kami persiapkan dengan baik. Segala koordinasi, kerjasama dan pelaksanaan tugas dalam tim kami tentu tak lepas dari peran pimpinan baik Bapak Edy Gunawan maupun Bapak Yan Inderayana yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya.

Aditya Endah Pertiwi:

Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mengangkat ekonomi lokal dan pelaku UMKM serta promosi pariwisata bagi Indonesia ini adalah hal yang baik bagi Indonesia. Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa semoga tim pengadaan Kemenkeu kedepannya semakin dapat merencanakan pengadaan dengan sebaik mungkin, apalagi jika dalam kegiatan berskala besar seperti G20 harus dari jauh hari dipersiapkan dengan baik.

Sebagai penutup perbincangan kita, Tim Info Pasti mau kasih info juga terkait manfaat yang diperoleh bagi Indonesia dengan terlaksananya Presidensi G20 di tengah pandemi ini. Hal ini membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Berikut beberapa manfaat nya:

- Merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
- Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.
- Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.

- Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.
- Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (*showcasing*) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi paska pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

Kiranya proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia semakin memberikan citra baik di mata dunia melalui perhelatan presidensi G20 tahun 2022. "*Recover Together, Recover Stronger*".

Teks: Jeri Martin

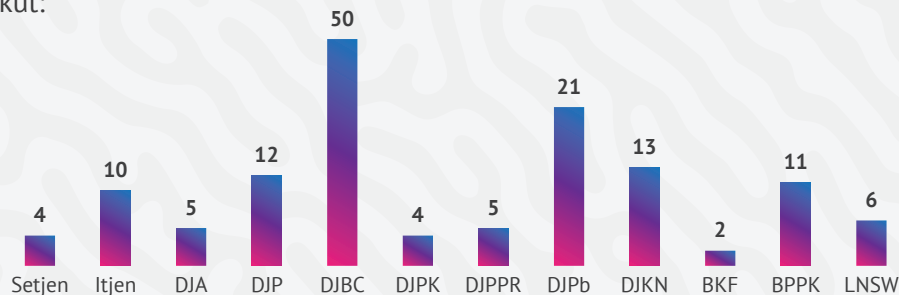
Foto: Jeri Martin





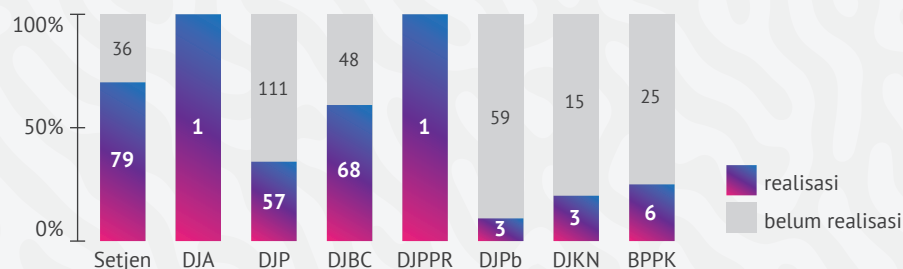
STRATEGI DAN KINERJA

- > Dengan optimalisasi aset melalui penggunaan aset bersama, ditargetkan akan mengurangi biaya sewa gedung kantor untuk Satker yang masih sewa
- > Penataan ruang kerja dengan konsep Activity Based Workplace (ABW) sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan pada 143 unit kerja baik di kantor pusat Unit Eselon I dan kantor vertikal, dengan rincian sebagai berikut:



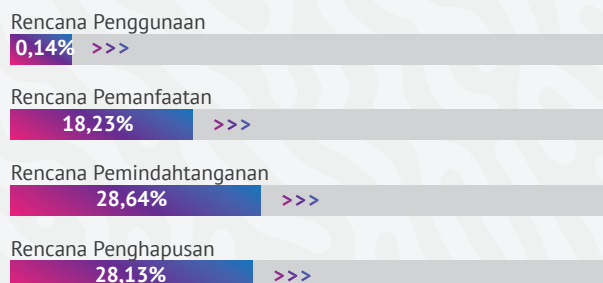
PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA

- > Terkait dengan terbitnya PMK 153/2021, terdapat perubahan aturan lingkup RKBMN dan RP4
- > Dalam pengukuran kesesuaian SBSK, untuk penilaian IPA dari target 512 BMN telah mencapai 42,58% berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Capaian SBSK s.d. 31 Mei 2022, sedangkan untuk penggunaan aset bersama 261 satker dari total Satker Kemenkeu mencapai 75,91% berdasarkan penghitungan s.d. 10 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:



PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

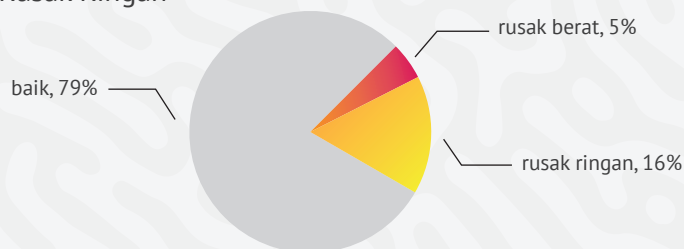
- > Progress Pensertipikatan Tanah dari 61 Capaian Nominatif, 4 aset telah diterbitkan sertifikatnya dan 12 aset masih bermasalah
- > Dari 55 BMN terindikasi idle, terdapat 6 BMN yang telah dalam proses tindak lanjut
- > Rencana Penggunaan target 33.363 BMN tercapai 0,14%, Rencana Pemanfaatan target 927 BMN tercapai 18,23%, Rencana Pemindahtanganan target 59.116 BMN tercapai 28,64%, dan Rencana Penghapusan target 60.456 BMN tercapai 28,13%



PENGELOLAAN MANAJEMEN Barang Milik Negara dan Pengadaan

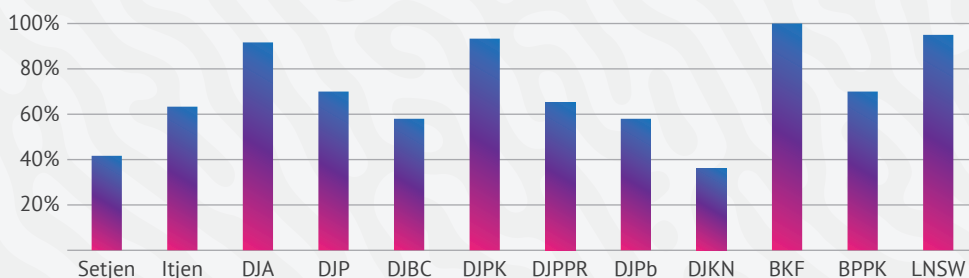
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

- > Berdasarkan data MONSERAH, terdapat 91 BMN tanpa dokumen kepemilikan dan 67 BMN bersertipikat atas nama pihak ketiga
- > Lalu 0,45% dari total BMN Kemenkeu sedang Dihentikan Penggunaannya dengan nilai perolehan Rp 586 Miliar
- > Berdasarkan data SIMAN, mayoritas BMN dalam kondisi baik. namun 5% dari total Rumah Negara berkondisi Rusak Berat dan 16% Rusak Ringan



PENGADAAN BARANG/JASA

- > UKPBJ Kemenkeu telah melaksanakan 581 paket pengadaan total pagu Rp 2,81 T s.d. Juni 2022
- > Dalam hal asistensi belanja strategis terdapat 112 paket pengadaan pada 75 satker total Rp 1,62 T s.d. Juni 2022, 43 paket diantaranya dalam pelaksanaan kontrak dimana 12 paket sudah PHO
- > Target PDN sebesar 70% dari belanja pengadaan sebesar Rp 8,25 T, capaian PDN mencapai 61% dari realisasi PBJ dan 27% dari target PDN, dengan rincian sebagai berikut:



OTOMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

- > Progress SuperApps Digitalisasi Aset telah mencapai 55% atau sedang dalam tahap pengembangan sistem hingga Juni 2022
- > BiroMadan telah memiliki 53 JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 12 JF Pranata Komputer. pada tahun 2022 belum ada penambahan JF namun akan dilantik 7 JF Pengelola PBJ dan 25 pegawai dalam proses seleksi JF Pengelola PBJ, berikut rincian formasi Jabatan Fungsional sampai saat ini:

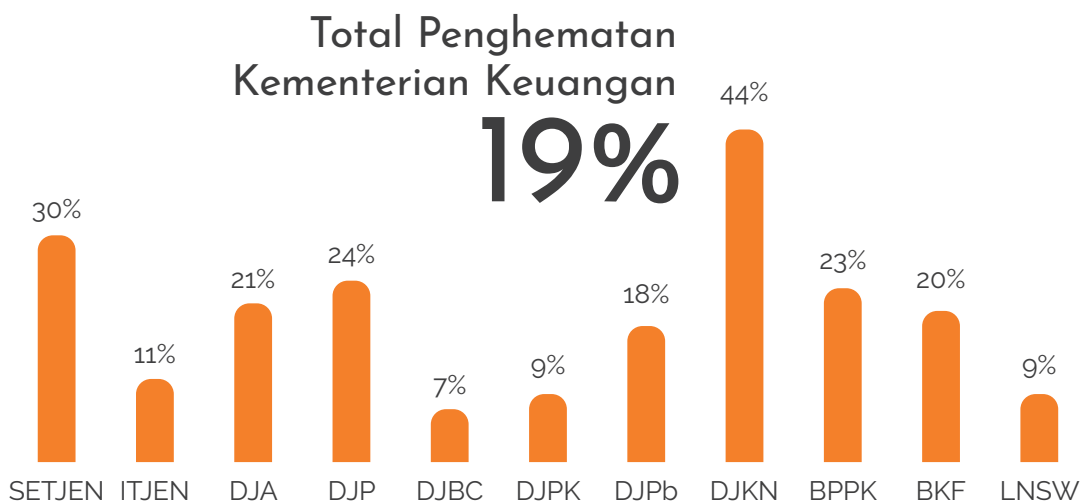


PENGHEMATAN ANGGARAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

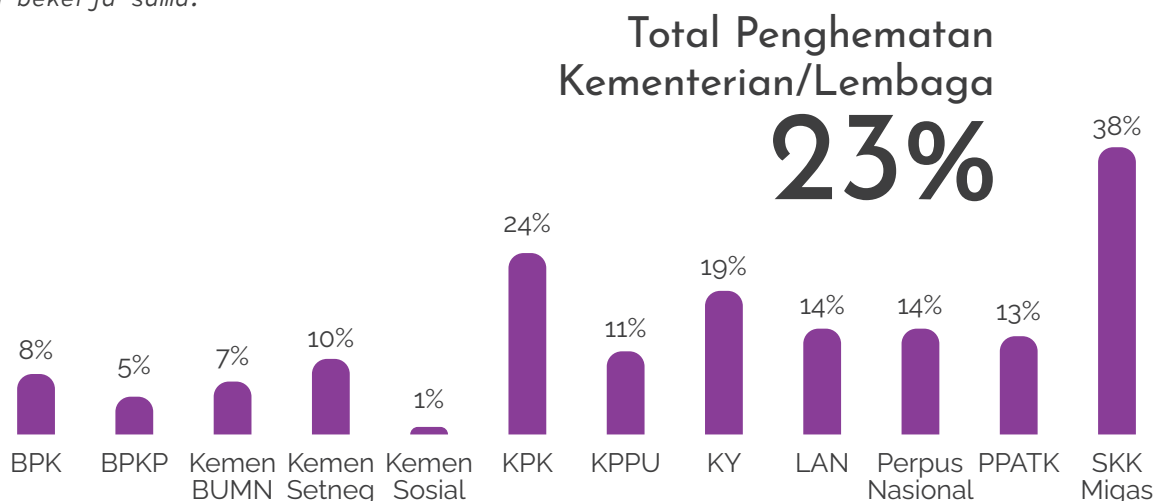
Penghematan = Pagu Anggaran - Nilai Kontrak

$$\text{Persentase Penghematan} = \left(\frac{\text{Nilai Penghematan}}{\text{Pagu Anggaran}} \right) \times 100 \%$$

Penghematan yang dihitung adalah penghematan dari paket lelang yang selesai dilaksanakan.



Penghematan e-procurement Kementerian / Lembaga yang bekerja sama.





Mengenal Teknologi Multi Lane Free Flow, Teknologi Terkini Pembayaran Tol

Indonesia akan memasuki era baru *Toll Roads Technology 4.0*, seiring penerapan sistem pembayaran tol non tunai nir sentuh berbasis *Multi Lane Free Flow* (MLFF). Nantinya, pengendara selaku pengguna jalan tol tidak perlu mengantri *tapping* kartu elektronik saat melewati gerbang tol. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerapkan sistem MLFF secara bertahap dimulai pada akhir 2022.

Multi Lane Free Flow (MLFF) merupakan sebuah sistem yang memungkinkan para pengendara untuk dapat terus melaju tanpa perlu berhenti di setiap gardu jalan tol untuk melakukan pembayaran tarif tol. Sistem MLFF ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol. Di dalam peraturan tersebut, terdapat 8 indikator pelayanan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas diukur dari rata-rata lama transaksi dan jumlah antrian di pintu tol. Rata-rata dari semua jenis transaksi di pintu tol, waktu maksimal yang dibutuhkan untuk transaksi atau pelayanan tidak boleh lebih dari 10 detik dan jumlah antrian kendaraan pada seluruh pintu tol tidak boleh lebih dari 10 kendaraan.

Dalam rangka optimalisasi penerapan sistem MLFF, diperlukan teknologi *Electronic Toll Collection* (ETC). Teknologi ETC yang akan diterapkan di beberapa ruas jalan tol di Indonesia adalah *Global Navigation Satellite System* (GNSS). GNSS adalah konstelasi satelit yang menyediakan sinyal dari ruang angkasa yang mentransmisikan data penentuan posisi dan waktu ke penerima GNSS. Penerima ini kemudian menggunakan data ini untuk menentukan lokasi mereka.



Pada dasarnya sistem GNSS sendiri dibagi menjadi 3 segmen utama, yakni:

1. *Space Segment* (Angkasa)

Segmen angkasa terdiri dari beberapa satelit GNSS yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang. Sinyal tersebut akan diterima oleh *receiver* di bumi dan

digunakan untuk menentukan informasi posisi, kecepatan, waktu, berikut parameter-parameter turunan lainnya.

2. *Control System Segment* (Sistem Kontrol)
Control System Segment berfungsi untuk mengontrol dan memantau operasional semua satelit GNSS dan memastikan bahwasanya semua satelit berfungsi sebagaimana mestinya. Tugas utama dari Sistem Kontrol ini yaitu memantau dan mengontrol sistem satelit, menentukan dan menjaga waktu sistem GNSS, memprediksi *ephemeris* satelit serta karakteristik jam satelit, secara periodik meremajakan pesan navigasi dari setiap satelit, dan melakukan manuver satelit agar tetap berada dalam orbitnya.

3. *User Segment* (Pengguna)

User Segment terdiri dari para pengguna satelit GNSS baik di darat, laut udara, maupun angkasa. Dalam hal ini, penerima sinyal (*receiver*) diperlukan untuk menerima dan memroses sinyal dari satelit untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan, waktu, maupun parameter turunan lainnya.

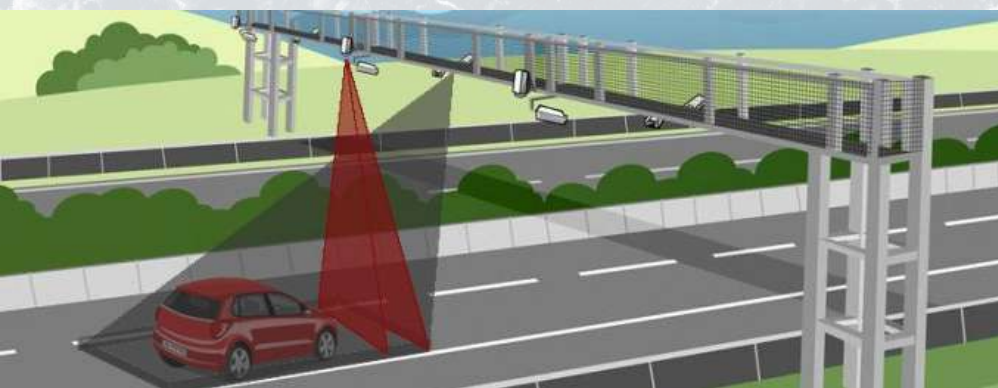
Beberapa keunggulan pengukuran menggunakan GNSS, antara lain:

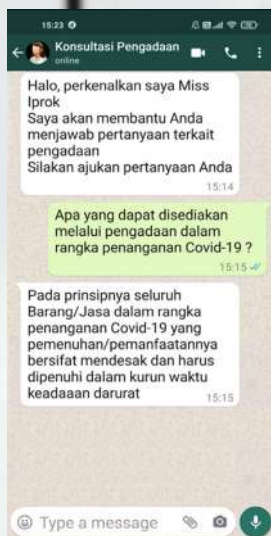
1. Dapat digunakan setiap saat tanpa tergantung waktu dan cuaca;
2. Satelit GNSS memiliki ketinggian orbit yang tinggi (20.000 km) di atas permukaan bumi sehingga mencakup wilayah yang luas dan dapat digunakan banyak orang dalam waktu bersamaan;
3. Efisien waktu, biaya, dan tenaga;
4. Ketelitian posisi dari orde millimeter (sangat teliti) hingga orde meter.

Diharapkan dalam adanya penerapan *Multi Lane Free Flow* ini, dapat mengurangi antrian transaksi pembayaran di gerbang tol menjadi nol detik yang sebelumnya waktu transaksi menggunakan uang elektronik selama 4 detik.

Teks: Yudha Pratama

Foto: fieldbee.com, autostradetech.it





Layanan Konsultasi Pengadaan 24/7 Menggunakan Chat Bot

Memasuki era industri 4.0, pengelolaan layanan didorong untuk melakukan perubahan budaya ke arah digital. Konsep industri 4.0 merupakan sebuah perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini. Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: *Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing* dan *Additive Manufacturing*.

Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu, secara tidak langsung turut mendorong percepatan transformasi digital di semua kegiatan termasuk layanan konsultasi pengadaan. Dalam kondisi pandemi, layanan konsultasi pengadaan dilakukan tanpa tatap muka, namun demikian harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelayanan prima.

Kendala yang kerap dihadapi dalam layanan tanpa tatap muka ialah dari sisi keterlambatan respon, interaksi yang terbatas, dan waktu layanan yang terbatas. Salah satu solusi untuk mengatasinya dengan mengembangkan Sistem Layanan Konsultasi Pengadaan 24/7 menggunakan teknologi *chat bot*. Sistem ini dapat menggantikan peran manusia, sehingga layanan dapat tersedia dalam 24 jam selama 7 hari atau biasa disingkat 24/7. Meskipun tidak memberikan respon secara penuh seperti manusia, tetapi layanan dapat tersedia dalam 24/7. Teknologi ini sudah banyak digunakan di sektor bisnis, tetapi belum banyak diterapkan di pemerintahan, khususnya belum pernah diterapkan dalam layanan konsultasi pengadaan.

Dengan sistem ini, dapat meningkatkan kinerja layanan dengan memanfaatkan data yang didapat dan diolah dari 5 teknologi yang menjadi pilar industri 4.0. Data tersebut kemudian bisa disampaikan secara otomatis dan tepat guna melalui *chat bot* yang dikembangkan.



Apa itu Chat Bot?

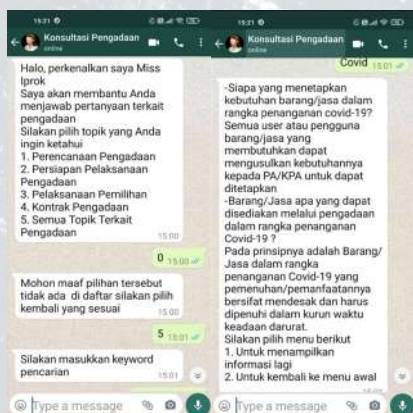
Chat bot adalah program komputer berbasis AI (*Artificial Intelligence*), alias robot virtual yang dapat simulasi percakapan layaknya manusia, yang juga dikenal sebagai asisten digital dimana dapat memahami dan memroses permintaan pengguna, lalu memberikan jawaban yang relevan dengan cepat.

Cara kerja chat bot adalah dengan melihat kata kunci pada kalimat/kata yang masuk, kemudian akan menjawab sesuai kata kunci yang paling cocok atau pola kata paling mirip dalam sebuah basis data tekstual dengan waktu cepat. Chat bot dapat diintegrasikan dengan aplikasi chat seperti WhastApp, Telegram, dan lain sebagainya.

Untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi chat bot dalam pengembangan sistem layanan konsultasi pengadaan 24/7, maka strategi pengembangan sistemnya dilakukan secara bertahap dengan desain modular, sehingga sistem lebih cepat di-launching dan dimanfaatkan. Strategi pengembangan sistem tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yaitu Tahap I Modul *Decision Tree-Based*, Tahap II Modul *Big Data*, Tahap III Modul *Artificial Intelligence*.

Tahap I - Modul *Decision Tree-Based*

Pengembangan modul ini dilakukan pada tahap I karena bersifat sederhana, memiliki tingkat kerumitan yang rendah, dan lebih cepat dalam pengembangannya.



Pada modul ini pengguna sistem akan diberikan opsi pertanyaan yang sudah disediakan dalam sistem yang bersumber dari fitur *Frequently Asked Questions* (FAQ). Lalu jika ada pertanyaan yang tidak tersedia dalam sistem, akan diteruskan ke WhatsApp *helpdesk* dengan disertai pesan bahwa pertanyaan tersebut akan dibalas segera mungkin pada hari dan jam kerja, serta disampaikan pula nomor telepon *call center*.

Tahap II - Modul *Big Data*

Pengembangan modul tahap II menggunakan teknologi *Big Data*, dimana bot melakukan *indexing* terhadap data yang diberikan baik terstruktur (basis data) maupun tidak terstruktur (pdf, xls, dll), lalu bot menyimpan informasi tersebut. Kemudian pengguna dapat melakukan pencarian sebuah kata kunci menggunakan aplikasi chat, selanjutnya bot akan mencari kata kunci tersebut dan memberikan informasi yang sesuai.

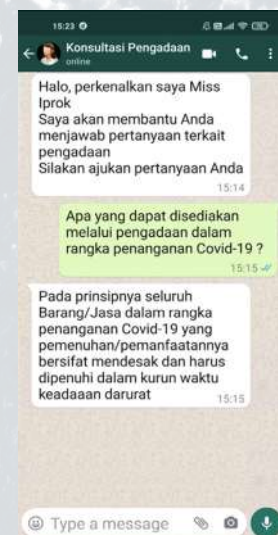


Tahap III - Modul *Artificial Intelligence* Menggunakan Teknologi *Natural Language Processing* (NLP)

Pengembangan modul tahap III menjadi semakin kompleks karena lebih komunikatif berdasarkan data dan prediktif. Pada tahap ini, bot bekerja layaknya seorang ahli pengadaan yang dapat berinteraksi dengan para pelaku pengadaan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat. Teknologi yang digunakan adalah *Natural Language Processing* (NLP) yang merupakan teknologi untuk memudahkan *Artificial Intelligence* untuk bisa memahami

setiap konteks dan maksud pengguna dalam bentuk bahasa yang sesuai.

Pengembangan sistem dengan teknologi NLP ini sangat rumit, namun demikian hal ini dapat dimudahkan dengan menggunakan platform *chat bot builder*. Agar pemilihan kata yang disampaikan bisa lebih pas, maka sebaiknya menggunakan produk platform chat bot lokal. Saat ini sudah terdapat beberapa platform chat bot lokal yang bisa digunakan, antara lain yang sudah terkenal dan banyak digunakan, yaitu vutura dan kata.ai.



Nah, dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa teknologi chat bot memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada *stakeholder* melalui pemberian Layanan Konsultasi Pengadaan 24/7. Dengan begitu, dapat meningkatkan *stakeholder engagement* dan *stakeholder experience* yang interaktif dan responsif.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Kementerian Keuangan, yaitu mewujudkan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan atau *Center of Excellence* yang memiliki karakter "SKOPER": strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Teks: Rachman Sukri

Foto: Elzi Fardani



Buko Pandan

Buko Pandan merupakan hidangan penutup yang segar khas Filipina. Dalam bahasa Filipina, "buko" artinya kelapa muda. Tak heran, jika hidangan ini menyajikan kelapa muda yang campur dengan air kelapa, susu, serta daun atau pasta pandan.

Hal yang identik dari hidangan ini adalah warna hijau khas yang didapat dari agar-agar. Sajian minuman bercita rasa manis ini biasanya dihidangkan dengan potongan es sehingga dapat menambah kesegaran saat dikonsumsi. Bagi Anda yang menyukai minuman olahan susu dan kelapa muda serta pandan, tentu sajian ini akan sangat menggugah selera.



Bahan agar-agar pandan:

- 1 bungkus swallow agar-agar hijau / plain
- 500 ml air
- 6 sdm gula
- Pasta pandan secukupnya

Bahan sago mutiara:

- 700 ml air
- 100 gr sago mutiara
- 4 sdm gula

Bahan vla *creamy*:

- 1 kaleng susu evaporasi carnation
- 200 ml susu kental manis carnation
- 150 gram *whipped cream* haan
- 2 sdm pasta pandan

Topping tambahan:

- Nata de coco secukupnya
- Daging kelapa secukupnya
- Parutan keju
- Es batu

Cara membuat:

1. Masukkan semua bahan agar-agar, masak hingga mendidih, sisihkan. Lalu potong kotak-kotak.
2. Siapkan panci masukkan semua bahan sago, aduk dan didihkan. Lalu matikan api, tutup selama 30 menit.
3. Setelah 30 menit, didihkan lagi 5 menit. Aduk rata hingga semua bintik putih hilang. Sago mutiara sudah matang, sisihkan.
4. Campur semua bahan vla *creamy* lalu sisihkan.
5. Tata semua bahan di mangkuk, lalu terakhir siram dengan vla *creamy* yang telah dibuat, taburkan parutan keju di atas dan buko pandan siap disajikan.

Teks: Beby Vizca

Foto: kawalingpinoy.com



Cara Sederhana Mengatasi Stres



Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap orang pernah pasti pernah mengalami stres. Sebenarnya, pada situasi tertentu stres dapat berdampak positif, misalnya membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat sebelum tenggat waktu. Namun, tidak semua orang memahami cara menghadapi dan mengatasi stres dengan baik, sehingga berdampak buruk pada kesehatan.

Ketika mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung lebih cepat dan terasa mudah lelah, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan membuat Anda lebih rentan terkena penyakit. Beberapa penyakit yang dapat dialami saat stres, antara lain:

1. Gangguan pencernaan, seperti kolitis ulseratif, gastritis, dan GERD
2. Masalah pada kulit dan rambut, seperti eksim, psoriasis, dan jerawat
3. Disfungsi seksual
4. Gangguan menstruasi
5. Obesitas dan gangguan makan lainnya
6. Penyakit kardiovaskular, seperti stroke, darah tinggi, dan penyakit jantung
7. Gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian
8. Sakit kepala
9. Gangguan tidur

Langkah utama menghadapi stres adalah dengan mencari tahu penyebab utamanya, agar dapat dipikirkan jalan keluarnya. Namun, apabila penyebab stres belum teratasi, lakukan hal-hal berikut untuk mengatasi stres dan membuat pikiran menjadi lebih rileks.

1. Ungkapkan keluh kesah

Memendam perasaan bisa membuat Anda stres, maka lepaskan beban dengan mengungkapkan semua hal yang ada di pikiran kepada orang terdekat atau psikolog. Setelah semua keluh kesah dikeluarkan, maka perasaan Anda pasti jauh lebih baik.

2. Olahraga secara rutin

Selain membuat tubuh sehat, olahraga juga dapat meredakan stres. Dengan berolahraga, otot tubuh akan lebih rileks dan pikiran Anda akan teralihkan sehingga bisa memperbaiki suasana hati. Cukup lakukan olahraga sederhana untuk melepas stres, seperti jalan santai atau bersepeda.

3. Lakukan aktivitas yang menyenangkan

Melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti memasak, berkebun, atau sekadar bernyanyi, membuat tubuh menghasilkan hormon bahagia, yaitu dopamin. Sehingga, tubuh dan pikiran Anda dapat lebih rileks. Namun, pastikan aktivitas yang Anda lakukan bersifat positif agar lebih bermanfaat.

4. Lakukan meditasi

Meditasi atau yoga selama 10-15 menit dan dilakukan sebanyak 4-5 kali dalam seminggu dapat menenangkan pikiran Anda. Melakukan meditasi dapat menurunkan kadar hormon penyebab stres, sehingga lebih tenang.

5. Elus-elus kucing atau anjing

Salah satu alasan mengapa anjing atau kucing dijadikan hewan terapi karena keduanya dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk mencurahkan kasih sayang. Memeluk atau membelai hewan penuh kasih dapat dengan cepat meningkatkan kadar serotonin dan dopamin yang berguna bagi tubuh untuk menenangkan pikiran dan otot. Dengan begitu, Anda akan menjadi lebih rileks.

Ditemani hewan peliharaan, ternyata juga dapat meringankan rasa kesepian. Contohnya anjing, hewan ini adalah stimulus hebat untuk membantu Anda memulai olahraga sehat, yang dapat meningkatkan mood, menekan depresi, serta menurunkan tekanan darah.

6. Terapkan pola hidup sehat

Selalu terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bernutrisi, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang.

Jangan biarkan stres berlarut dan bertambah parah hingga menyebabkan gangguan kesehatan. Bila berbagai cara mengatasi stres di atas tidak juga berhasil, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

Teks: Ayu Damelia

Foto: pexels.com



Journaling: Hobi Berkedok Healing

Dear diary, kata tersebut sempat menjadi kata yang populer pada tahun 90an sampai dengan awal 2000an dikala penulis masih muda. Menulis *diary* merupakan salah satu hobi yang sangat populer di kalangan anak muda. Pada zamannya, hampir semua anak sekolah, terutama anak perempuan, memiliki buku harian atau *diary*. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, hobi menulis buku harian tersebut mulai tergerus kemudahan teknologi. Kehadirannya mulai digantikan oleh berbagai macam *platform* menulis seperti *blog*. Semakin berkembangnya teknologi gawai yang ada, maka hobi tersebut mulai tergantikan oleh media sosial yang memudahkan orang untuk menumpahkan isi kepalanya lewat tulisan di *platform* seperti *tumblr*, *twitter*, *facebook*, atau *platform* media sosial lainnya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hobi menulis mulai digemari lagi oleh beberapa kalangan khususnya orang-orang yang mulai merindukan menulis di kertas. Hobi menulis ini kembali digemari di tengah maraknya kemudahan yang ditawarkan oleh berbagai macam teknologi. Menurut para penggelut hobi ini, menulis dengan tangan memiliki kenikmatan tersendiri dibanding menulis melalui *keyboard* laptop atau *handphone*. Hobi yang kerap disebut *journaling* ini semakin digandrungi karena disebut memiliki banyak manfaat khususnya untuk kesehatan mental.



Isi pikiran yang mengendap di dalam pikiran kita dipercaya dapat mengganggu *mood* kita, bahkan emosi dan perasaan yang dipendam menjadi salah satu penyebab dari stres berlebih. Sehingga, kita perlu memiliki sebuah *output* untuk menuangkan perasaan dan isi pikiran secara berkala melalui berbagai perantara. Oleh karena itu, *journaling* dipercaya menjadi salah satu metode kekinian untuk menuangkan ide dan isi pikiran kita. Hobi ini memberikan kita wadah untuk menulis apa yang kita pikirkan dalam sebuah catatan kecil. Catatan tersebut berisi kejadian-kejadian harian dan bagaimana respon batin kita menanggapi kejadian atau kegiatan harian tersebut. Sehingga, kita memiliki sebuah wadah untuk bercerita dan melepaskan penat.

Ira Progoff, seorang psikoterapis asal Amerika Serikat memperkenalkan terapi menulis jurnal untuk memberikan cara sederhana bagi orang-orang untuk mengekspresikan perasaannya melalui catatan harian kecil yang dirancang sedemikian rupa, untuk menceritakan perasaan mereka secara berurutan. Metode ini ditujukan agar seseorang dapat mengembangkan cara mengekspresikan perasaannya secara bertahap dan mampu mengembangkan kematangan emosionalnya. Cara ini semakin populer dengan adanya berbagai *workshop* yang mengampanyekan kegiatan menulis jurnal sebagai terapi diri untuk melampiaskan

perasaan yang kita alami. Sehingga, kegiatan menulis jurnal menjadi populer bahkan menjadi sebuah hobi yang bertujuan di luar kepentingan terapi psikologis.

Meskipun terlihat sederhana, hobi *journaling* ini memiliki banyak jenis dan macamnya, ada yang disesuaikan dengan waktu, isi jurnal, hingga tujuan penulisannya. Jenis *journaling* antara lain yang pertama adalah *gratitude journal* yaitu jenis *journaling* untuk menuliskan segala hal yang membuat kita merasa berterima kasih setiap harinya. Yang kedua adalah *morning journal* yaitu jurnal yang ditulis di pagi hari setelah bangun tidur, biasanya jurnal ini berisi tentang ide, keinginan, dan hal yang dipikirkan sesudah terbangun. Selain itu, *morning journal* juga dapat diisi dengan rencana maupun kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari tersebut. Yang ketiga adalah *Self-reflective Journal* yang berisi tentang semua hal yang telah dilakukan dalam satu hari itu. Penulis dapat menceritakan aktivitas sekaligus perasaannya sejak pagi hingga malam hari. Yang terakhir adalah *Reading Journal*, yaitu jurnal untuk melakukan *tracking* terhadap seberapa banyak bacaan yang dibaca setiap harinya. Misalkan, 5 halaman per hari, 1 bab per hari, atau sebagainya.

Teks: **Indyashadi Satya**

Foto: **pexels.com**



Buang Sampah Jadi Cuan

Pernahkah kita dibuat penat dengan kondisi lingkungan di Indonesia khususnya di Ibu Kota Jakarta? Melihat banjir yang semakin parah karena tumpukan sampah plastik atau melihat satwa laut mati mengonsumsi sampah plastik. Hal tersebut membuat hati kita merasa tidak nyaman, terlebih mengetahui bahwa pelakunya adalah diri kita sendiri.

Berdasarkan data McKinsey & Co dan *Ocean Conservancy*, jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia hingga 63,9 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 10% yang dapat didaur ulang. Sisanya, berakhir di TPA atau lebih buruk terbawa arus ke laut. Tanpa aksi nyata, sampah plastik akan semakin mencemari laut secara signifikan. Hal tersebut diperburuk dengan fakta bahwa limbah plastik tidak bisa terurai hingga 450 tahun, sehingga timbunan dan residunya akan melepaskan bahan kimia beracun dan beresiko mencemari lingkungan. Akibatnya akan mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna, bahkan manusia.

Namun, sejak tahun 2020 lalu, berkembang terobosan dalam meringankan permasalahan sampah plastik. Duitin, sebuah layanan digital yang memfasilitasi masyarakat menukarkan sampah daur ulangnya untuk mendapatkan *reward* berupa uang digital. Mungkin terdengar aneh ketika sampah yang sudah tidak dibutuhkan dapat dijual dengan mudah. Namun, aplikasi yang merupakan salah satu dari 8 lulusan program akselerator pertama di Indonesia dapat mewujudkan hal tersebut.

Adijoyo Prakoso selaku *Chief Operation Officer* Duitin menyampaikan *start-up* ini berawal dari misi sosial ke kampung pemulung untuk mengetahui cara mereka bertahan hidup dan seperti apa *pain point*-nya. "Kami menemukan



fakta bahwa pemulung ternyata banyak yang membeli sampah daur ulang dari warung untuk dijual kembali ke pelapak yang kemudian baru dikumpulkan untuk dijual kembali ke pabrik daur ulang" ujar Adijoyo. Dari misi tersebut mereka menyadari bahwa proses tersebut dapat dimudahkan oleh teknologi. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pengelolaan sampah daur ulang. Di sisi lain, Duitin juga menjadi sebuah gerakan untuk memilah, mengumpulkan serta mengolah sampah sehingga bisa mendapatkan 'kehidupan kedua' melalui proses daur ulang.

Telah tersedia 6 klasifikasi sampah daur ulang yang dikelola melalui *start-up* yang berjalan sejak Juli 2020, yaitu plastik, karton, kaca, minyak jelantah, kaleng aluminium, popok bayi,

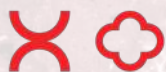


serta kotak *multi-layer*. Duitin mempermudah masyarakat yang ingin mulai memilah sampahnya tanpa mempersulit dengan kategori sampah yang terlalu banyak. Layanan aplikasi yang sudah memiliki lebih dari 100.000 pengguna ini sudah tersebar di DKI Jakarta, serta beberapa kota lainnya seperti Bogor, Tangerang Selatan, Depok, dan Yogyakarta.

Prosesnya mudah, cukup dengan mengunduh aplikasi Duitin pada gawai, lalu pilah sampah sesuai klasifikasi yang ada, kemudian membuat jadwal pengambilan sampah dengan *picker* Duitin layaknya memesan ojek daring. Selanjutnya, sampah ditimbang dan akan dihargai otomatis oleh aplikasi Duitin. Per kilogram sampah plastik dihargai Rp1.500, sampah karton atau kertas lainnya Rp1.000, sampah kaca Rp300, minyak jelantah Rp2.500, kaleng aluminium Rp3.500, popok bayi Rp600, dan kotak *multi-layer* Rp 250. Pengguna menjual sampahnya untuk mendapatkan *reward* berupa Duitin Coin sesuai harga sampah yang dikumpulkan. Duitin Coin dapat digunakan untuk membeli produk atau dicairkan ke rekening bank. Saat ini Duitin telah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti LinkAja dan DANA.

Teks: Indyashadi Satya

Foto: pexels.com, duitin.id



Edy Gunawan Menjadi Saksi Diluncurkannya Aplikasi Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa



Pagi ini, (Rabu 02/02/2022) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Biromadan), Edy Gunawan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI yaitu *Launching* Aplikasi Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa serta Diskusi Publik “Pencegahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik Pengadaan Barang dan Jasa”.

Rangkaian kegiatan yang diawali dengan peluncuran Aplikasi Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa dengan dibuka oleh Yeka Hendra Fatika yang dalam sambutannya mengatakan “Dengan diluncurkannya aplikasi ini, diharapkan dapat mempercepat laporan

atas maladministrasi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Ombudsman serius menangani laporan barang dan jasa ini karena potensi kebocoran uang negara ada banyak di sini. Sehingga ke depan keuangan negara dapat lebih hemat.”

Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto dalam pemaparannya menyampaikan aplikasi pengaduan pengadaan barang dan jasa ini mengusung konsep *borderless* yaitu dapat diakses kapan saja dan dimana saja yaitu melalui situs resmi Ombudsman RI.

Acara peluncuran aplikasi pengaduan pengadaan barang dan jasa ini juga diisi dengan Diskusi Publik bertema “Pencegahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik

Pengadaan Barang dan Jasa” dengan narasumber Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggal LKPP Setya Budi Arijanta, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK - Fridolin Berek, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan - Edy Gunawan, serta dimoderatori oleh Ahli Pengadaan, Khalid Mustafa.

Kiranya melalui sinergi antar kementerian/ lembaga ini, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah di Indonesia semakin memudahkan masyarakat.

Teks: Jeri Martin

Prestasi Baru Biro Manajemen BMN dan Pengadaan di Awal Tahun 2022

Awal tahun yang membanggakan bagi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan dapat meraih penganugerahan "Top 5 Inovasi Terbaik" dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2021. Acara penyerahan anugerah yang dilaksanakan secara daring oleh Biro Organta pada Rabu (23/02/2022) dihadiri oleh kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Edy Gunawan.

Aplikasi e-Sewa BMN yang diusung oleh tim IT Biro Manajemen BMN dan Pengadaan yang terdiri dari Rachman Sukri, Yosia Rimbo, dan Dwi Citra merupakan inovasi yang menerima anugerah Top 5 Inovasi Terbaik (KIKK) Tahun 2021. Aplikasi ini merupakan informasi dalam transformasi pemanfaatan BMN masa depan dan merupakan wujud komitmen Biro Manajemen BMN dan Pengadaan untuk selalu menciptakan terobosan baru dan selalu berkarya terutama dalam hal pelayanan pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Tujuan dari aplikasi e-Sewa ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dari satuan kerja terkait optimalisasi aset dalam rangka menunjang PNBPN karena dengan aplikasi ini BMN yang akan disewakan dapat ditayangkan/ di-publish secara lebih luas serta dapat memperbaiki proses penyewaan BMN agar sesuai dengan prosedur yang didukung oleh sistem informasi yang komprehensif, modern, dan akuntabel, kemudian dalam hal arsip pengelolaan BMN juga dapat terdokumentasi dengan baik, selain itu juga dalam rangka persiapan pemindahan ibu kota negara agar dapat mengoptimalkan pengelolaan aset.

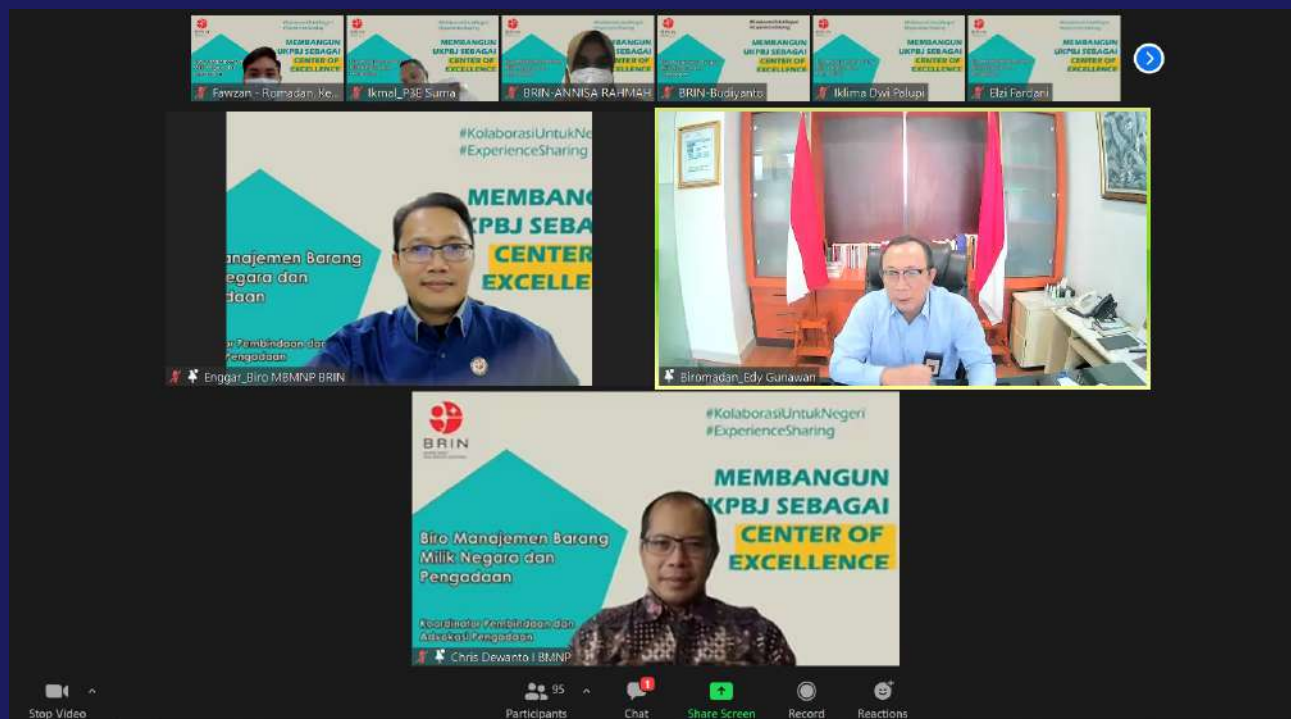


Biro Manajemen BMN dan Pengadaan juga berharap di masa depan aplikasi e-Sewa ini dapat diterapkan pada semua K/L dengan melakukan peninjauan kerja sama dengan nota kesepahaman karena desain sistem dari aplikasi ini juga memang telah dirancang untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh K/L. Apabila cita-cita ini dapat terwujud tentunya manfaat yang dirasakan jauh lebih luas lagi khususnya dalam hal efisiensi pengelolaan BMN secara nasional dan juga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Diharapkan dengan menerima anugerah Top 5 Inovasi Terbaik KIKK ini akan menjadikan motivasi yang lebih tinggi lagi bagi seluruh pegawai Biro Manajemen BMN dan Pengadaan untuk dapat berkontribusi serta berkolaborasi dalam menciptakan terobosan baru terutama dalam hal efisiensi pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Teks: Ayu Damelia

Biromadan Memberikan Sharing Experience kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional



Pagi ini (Kamis 02/03/2022) melalui *Zoom Meeting*, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara (Biromadan), Edy Gunawan menjadi narasumber dalam kegiatan *Sharing Experience* menuju UKPBJ sebagai *Center of Excellence* yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) BRIN, Bapak Christianus Ratrias Dewanto. Ada sekitar 100 peserta yang hadir dalam *Zoom Meeting* diantaranya adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan Penjabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BRIN bahkan beberapa K/L lain pun terpantau hadir dalam kegiatan ini.

Acara ini diselenggarakan sebagai ikhtiar awal BRIN untuk mendalami konsep perluasan fungsi pengadaan yang awalnya berbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Biromadan hadir untuk memberikan *sharing knowledge* dalam membangun UKPBJ di Kementerian Keuangan dalam hal manajemen pengembangan organisasi dan pengambilan kebijakan terkait pengembangan SDM dan Organisasi UKPBJ. Biromadan juga memberikan *sharing experience* dalam membina UKPBJ hingga sampai level Pro Aktif.

Edy Gunawan menjelaskan bahwa Kematangan UKPBJ menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) di Biromadan sebagai bentuk keseriusan pimpinan untuk segera mewujudkan

organisasi pengadaan (UKPBJ) yang terbaik di Indonesia.

Menutup sesi *sharing* ini, Edy Gunawan menuturkan bahwa UKPBJ Kementerian Keuangan terus berkomitmen menjalankan peran sebagai mentor UKPBJ membantu mendorong dan supervisi Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya demi terciptanya ekosistem pengadaan barang/jasa yang berintegritas.

Teks: Jeri Martin | jerimartin@brin.go.id



Wujudkan Pengelolaan BMN yang Akuntabel Melalui Webinar Pengawasan dan Pengendalian BMN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN yang bertanggungjawab Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Biomadan) mengadakan kegiatan sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian BMN Terbaru dan Urgensi Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Akuntabel. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan, dilaksanakan melalui daring pada Rabu (02/03/2022) dan dihadiri oleh pejabat/pegawai selaku pengguna barang seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan menghadirkan dua orang narasumber yaitu Siti Fadliyah selaku pejabat fungsional Auditor Madya dari Inspektorat Jenderal dan Dwi Kurniawan selaku Kepala Seksi BMN II dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN merupakan sebagai bagian dari siklus Pengelolaan Aset sangat penting dalam mewujudkan 3T (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum) pada pengelolaan BMN. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Dari sisi kebijakan, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 207/PMK.06/2021



tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Dalam peraturan terbaru ini, terdapat hal baru dalam proses Wasdal BMN diantaranya ada penahapan proses pelaporan Laporan Wasdal Kementerian/Lembaga serta beberapa kebijakan lain yang perlu menjadi perhatian khusus dari seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, dimulai pada tahun 2021, DJKN mencoba memperkenalkan tentang Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang mana penyampaian laporan Wasdal K/L menjadi salah satu parameter yang diukur.

Dari sisi proses *governance* pengelolaan BMN, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan masih dapat ditingkatkan khususnya dalam Wasdal BMN. Salah satu diantaranya adalah pemanfaatan Laporan Wasdal yang selama ini rutin dilakukan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Wasdal berisi *summary* proses pengelolaan BMN di suatu satuan kerja, sehingga informasi di dalamnya seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

dalam pengelolaan BMN demi akuntabilitas pengelolaan BMN di Kementerian Keuangan.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini kepada seluruh manajer aset di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada satuan kerja serta pemahaman yang komprehensif terkait Wasdal BMN di Kementerian Keuangan.

Teks: Ayu Damelia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

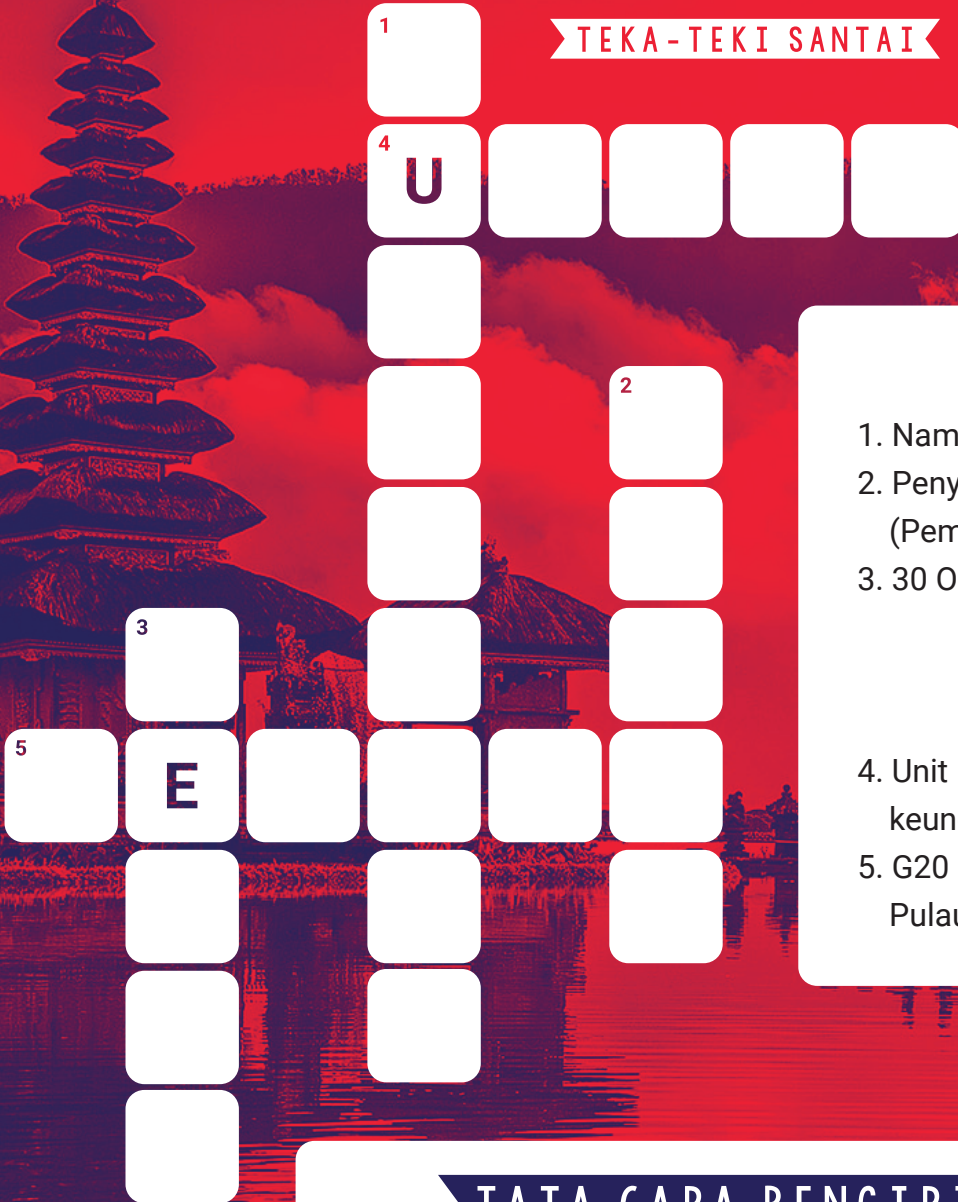
RABU 2 MARET 2022
09:30 - 12:00 WIB

TEMA:
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

Moderator: Edy Gunawan
Narasumber: Siti Fadliyah, Dwi Kurniawan S.
Moderator: Lucky Akbar, Beby Vizca



TEKA-TEKI SANTAI



MENURUN



1. Nama calon Ibu Kota Negara baru
2. Penyerahan BMN kepada pihak lain (Pemerintah Daerah/Yayasan)
3. 30 Oktober diperingati sebagai Hari ...

MENDATAR

4. Unit Kerja di K/L sebagai pusat keuangan PBJ
5. G20 Indonesia 2022 diadakan pada Pulau ...

TATA CARA PENGIRIMAN JAWABAN



isikan jawabanmu pada halaman ini, lalu *screenshot* hasil isian jawabanmu



upload jawabanmu di **Instagram Story** kamu, lalu tag **@pastikanasetkita**



pengirim jawaban tercepat akan mendapatkan souvenir menarik



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PASTIKAN
Aset Kita

#LAYANAN TANPA BIAYA!



INDEKS KEPUASAN LAYANAN TAHUN 2021

Registrasi dan Verifikasi: **4.75/5**

Helpdesk (Call Center, Email, WhatsApp): **4.74/5**

Pelatihan Aplikasi Pengadaan: **4.71/5**

Asistensi Pengadaan: **4.91/5**

SANGAT PUAS



Call Center
134



WhatsApp
0852 1740 4522



Email
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

#PastikanAsetKita #RomadanZIWbKWBBM

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

// **ZONA
INTEGRITAS**
Menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



G20 INDONESIA
2022

info **Pasti**

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

www.romadan.kemenkeu.go.id